



KEMENTERIAN
PERTANIAN |PKH| hilirnkk

LAPORAN

KINERJA

DIREKTORAT HILIRISASI HASIL
PETERNAKAN

2025



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan (Direktorat Hilirnak) Tahun 2025 dapat disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kinerja di bidang hilirisasi hasil peternakan tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Hilirnak ini disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menyajikan tingkat pencapaian atau keberhasilan yang tercermin dalam analisis pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Hilirnak Tahun 2025.

Melalui kerja keras seluruh jajaran Direktorat Hilirnak, dan didukung oleh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, Direktorat Hilirnak telah berhasil merealisasikan kegiatan yang dialokasikan baik di pusat maupun di daerah. Kami menyadari meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan masih cukup banyak, sehingga diperlukan kerja yang lebih cerdas dan keras pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih atas kerja cerdas dan keras seluruh jajaran Direktorat Hilirnak serta seluruh pemangku kepentingan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pengembangan hilirisasi hasil peternakan untuk terwujudnya *Good Governance* di Direktorat Hilirnak khususnya dan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada umumnya.

Jakarta, 23 Januari 2026

Direktur
Hilirisasi Hasil Peternakan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Makmun".

Makmun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Hasil Peternakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan, yang diwujudkan dalam Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan.

Dalam implementasi program dimaksud dilaksanakan kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang dijabarkan menjadi 5 (lima) indikator yaitu: (1) Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan; (2) Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar; (3) Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan, (4) Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan; dan (5) Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Program dan kegiatan Direktorat Hilirnak dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan TA. 2025, Direktorat Hilirnak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.498.880.440,- atau 99,98%.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Kegiatan Direktorat Hilirnak tahun 2025 adalah **sangat berhasil** dengan capaian diatas 100% yang diperoleh dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut: indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu (1) Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan (110,00%); (2) Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar (103,46%); (3) Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan (103,04%). Sedangkan Indikator yang termasuk dalam kriteria **berhasil** yaitu: (4) Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan (100%); dan (5) Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan (100%).

Direktorat Hilirnak menjalankan tugas fungsi dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Pada tahun 2025, berbagai terobosan sebagai upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan telah dilaksanakan antara lain dengan: 1) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan *massif* dengan penyediaan skema insentif investasi usaha peternakan; 2) Melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka sinergitas dan optimalisasi sumber daya; 3) Fasilitasi kemitraan investasi sapi perah dan sapi pedaging; 4) Pembinaan dan Pendampingan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan, serta pendampingan proses memperoleh sertifikasi dan izin edar produk susu; 5) Pengawalan penyerapan susu untuk program MBG dan proses memperoleh sertifikasi dan izin edar produk susu; 6) Pendampingan penerapan standar mutu hasil peternakan kepada pelaku usaha; 7) Pengawasan mutu komoditas peternakan pada rantai pasok; 8) Pengujian mutu produk peternakan, baik melalui uji cepat maupun laboratorium pengujian; 9) Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kemitraan perunggasan untuk pengembangan ekspor; 10) Koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait, khususnya dengan industri sebagai offtaker produk peternakan; serta 11) Dukungan regulasi, perizinan, diplomasi perdagangan, serta promosi ekspor mempercepat kesiapan produk peternakan untuk ekspor.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis dan RPJMP 2025-2029, keberhasilan Direktorat Hilirnak pada awal RPJMN 2025-2029 diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilan empat tahun ke depan. Direktorat Hilirnak selalu berkomitmen dan berupaya mewujudkan *good governance* dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan memaksimalkan kemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis, tertib dan akuntabel. Segala upaya dimaksud untuk mencapai tujuan hilirisasi hasil peternakan yang berdaya saing, bernilai tambah dan berkelanjutan, dan mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan maju, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Dukungan Anggaran	6
F. Isu Strategis Direktorat Hilirnak	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	12
C. Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	11
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	22
B. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2025	23
C. Kinerja Fungsi Teknis	54
D. Akuntabilitas Keuangan	60
E. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut	63
BAB IV. PENUTUP	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Alokasi anggaran Eselon II lingkup Ditjen PKH tahun 2025	6
Tabel 2	Anggaran Direktorat Hilirnak berdasarkan Rincian Output tahun 2025	7
Tabel 3.	Anggaran Direktorat Hilirnak 2025 berdasarkan kewenangan	7
Tabel 4.	Visi, misi, tujuan dan indikator tujuan Direktorat Hilirnak	12
Tabel 5.	Indikator kinerja sasaran kegiatan Direktorat Hilirnak tahun 2025	20
Tabel 6.	Capaian sasaran kegiatan Direktorat Hilirnak tahun 2025.....	23
Tabel 7.	Perbandingan realisasi kinerja persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan dengan target jangka menengah	26
Tabel 8.	Perbandingan realisasi kinerja persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar dengan target jangka menengah	30
Tabel 9.	Perbandingan realisasi kinerja persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan dengan target jangka menengah	34
Tabel 10.	Perbandingan realisasi kinerja persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan dengan target jangka menengah	38
Tabel 11.	Realisasi Investasi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025	41
Tabel 12.	Perbandingan realisasi kinerja peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan target jangka menengah	42
Tabel 13.	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Tahun 2025	51
Tabel 14.	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Subsektor Peternakan Tahun 2025	52
Tabel 15.	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Subsektor Peternakan Per Komoditi Tahun 2025	52
Tabel 16.	Realisasi Keuangan Per KRO Tahun 2025	61
Tabel 17.	Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan Tahun 2025	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025	56
-----------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan	69
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025	70
Lampiran 3.	Manual IKU Direktorat Hilirnak Tahun 2025-2029	78
Lampiran 4.	Pengukuran Efisiensi dan Nilai Efisiensi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025	84
Lampiran 5.	Unit Usaha Pengolahan Susu yang sudah bersertifikat NKV	86
Lampiran 6.	Pelaku Usaha dan Produk Olahannya Yang Sudah Mendapat Izin Edar (MD)	88
Lampiran 7.	Pembinaan dan Koordinasi Kemitraan dengan Pelaku Usaha ...	90
Lampiran 8.	Surat Tugas Tim Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Dalam mendukung peningkatan daya saing produk peternakan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan memiliki tugas Melaksanakan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Hasil Peternakan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan hilirisasi hasil peternakan, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan dengan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaksanaan program/kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keadaulatan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan

Kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Pertanian.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024, Kementerian Pertanian memiliki 10 eselon I, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan berganti nomenklatur menjadi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Direktorat Hilirnak terdiri atas:

1. Subbag Tata Usaha;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai tindak lanjutnya juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/KPTS/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Hilirnak terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan

Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pendampingan, pascapanen, dan pengolahan hasil peternakan.

a. Tim Kerja Pascapanen Hasil Peternakan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pendampingan pascapanen hasil peternakan.

b. Tim Kerja Pengolahan Hasil Peternakan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pendampingan pengolahan hasil peternakan.

2. Kelompok Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan

Kelompok Penerapan, pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan, pengawasan, dan sertifikasi mutu

a. Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Peternakan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan mutu produk peternakan.

b. Tim Kerja Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi mutu produk peternakan.

3. Kelompok Investasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan

Kelompok Investasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di

bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pengelolaan kelembagaan peternak.

a. Tim Kerja Investasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pembiayaan usaha peternakan.

b. Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan.

4. Kelompok Pemasaran

Kelompok Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil peternakan.

a. Tim Kerja Informasi Pemasaran

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

b. Tim Kerja Pengembangan Pemasaran

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran dan promosi hasil peternakan.

Struktur organisasi Direktorat Hilirisan Hasil Peternakan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Hilirnak per Desember 2025 sebanyak 51 orang, yang terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural : Eselon II sebanyak 1 orang dan Eselon IV sebanyak 1 orang.
2. Jumlah pegawai menurut golongan: golongan IV sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 36 orang, dan 1 orang golongan IX (PPPK);
3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 23 orang, S-1 sebanyak 25 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 1 orang.
4. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 27 orang dan perempuan sebanyak 24 orang.

E. Dukungan Anggaran

Alokasi anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.268.284.347.000,- dan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mendapat alokasi sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Komposisi anggaran Ditjen PKH sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Eselon II Lingkup Ditjen PKH Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp.)	Blokir Perjadin	Pagu Tanpa Blokir (Rp.)
1	Direktorat Bitpro	407.021.180.000	165.539.000	406.855.641.000
2	Direktorat Pakan	6.693.683.000	-	6.693.683.000
3	Direktorat Keswan	347.794.799.000	-	347.794.799.000
4	Direktorat Kesmavet	23.585.405.000	-	23.585.405.000
5	Direktorat Hilirnak	4.500.000.000	-	4.500.000.000
6	Sek-retariat	478.689.280.000	8.074.414.000	470.614.866.000
JUMLAH		1.268.284.347.000	8.239.953.000	1.260.044.394.000

Dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025 dialokasikan pada Kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan (5891) dengan rincian output (RO) sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Direktorat Hilirnakan Berdasarkan Rincian Output Tahun 2025

Kode	Rincian Output	Satuan	Pagu	
			Vol	Anggaran (Rp.)
5891	Hilirisasi Hasil Peternakan			4.500.000.000
QDB	Lembaga yang tereduksi akses pemberdayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	278	1.923.189.000
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	3	300.000.000
AEA	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	4	2.577.691.000

Untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Hilirnakan, anggaran tersebut dibagi berdasarkan kewenangan dengan bobot anggaran tersebar pada provinsi dan Pusat sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Anggaran Direktorat Hilirnakan Tahun 2025 Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Pagu (Rp.)
1	Kantor Pusat	4.469.410.000
2	Tugas Pembantuan	30.590.000
	Jumlah	4.500.000.000

Anggaran tugas pembantuan Direktorat Hilirnakan tahun 2025 dialokasikan pada Satker Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi yaitu NTT, NTB dan Gorontalo. Alokasi anggaran kegiatan tugas pembantuan ini untuk kegiatan koordinasi pemnafaatan kapal ternak.

F. Isu Strategis Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

Peningkatan populasi sapi pedaging dan sapi perah yang diharapkan meningkat setiap tahun, belum dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan daging dan telur dalam negeri. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari aspek kebijakan, insentif investasi, optimalisasi reproduksi ternak, pengembangan bank pakan, pengendalian penyakit hewan, pengembangan pembibitan baik di UPT

Ditrektorat Jenderal PKH, UPTD, maupun pelaku usaha, belum dapat mengakselerasi peningkatan populasi sapi.

Direktorat Hilirnak sejak tahun 2024, mendapat penugasan khusus dalam upaya percepatan peningkatan investasi peternakan sapi perah terintegrasi, dan pembibitan/pembriakan sapi pedaging. Bersama unit kerja Eselon II dan UPT lingkup Ditjen PKH melakukan upaya mendorong para pelaku usaha utamanya pelaku usaha budidaya, industri pengolahan, importir susu dan importing daging untuk meningkatkan atau memulai investasi pembibitan/pembriakan sapi dengan sumber ternak dari impor sapi. Direktorat Hilirnak melaksanakan penugasan antara lain melalui regulasi deregulasi, pendampingan kemudahan perizinan usaha, koordinasi pemanfaatan lahan, fasilitasi kemitraan, pascapanen dan pengolahan, penerapan jaminan mutu, dan pemasaran.

Direktorat Hilirnak pada tahun 2025 juga mendapat penugasan khusus dalam pengembangan model hilirisasi ayam terintegrasi. Pengembangan model ini dilaksanakan bersama PSEKP Kementerian, dan dalam implementasinya direncanakan akan dilaksanakan bersama jajaran Direktorat Jenderal PKH, PT Berdikari (ID Food) dan PTPN Regional III.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah:

"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu eselon I di bawah Kementerian Pertanian mendukung kedua visi tersebut dengan:

"Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia"

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung dengan visi:

“Hilirisasi Hasil Peternakan yang Berdaya Saing, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan”

Hilirisasi hasil Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor serta meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha peternakan dengan ramah lingkungan. Daya saing subsektor peternakan adalah kemampuan subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan. Pengembangan subsektor peternakan indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat sesuai perkembangan kebutuhan dalam jumlah dan kualitas yang baik. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

2. Misi

Sesuai dengan visi nasional, Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal PKH maka misi yang harus dilakukan oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan periode 2025-2029 adalah penciptaan nilai tambah dan daya saing yang berkelanjutan.

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing dapat dicapai melalui daya saing usaha peternak (peningkatan efisiensi usaha dan permodalan), daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Misi dari Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan usaha peternakan;
- b. Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui pascapanen dan pengolahan;
- c. Meningkatkan hasil peternakan yang bermutu dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan daya saing pemasaran hasil peternakan di pasar domestik dan ekspor.

Potensi basis komoditas dan produk unggulan subsektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing subsektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Beberapa langkah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan di Indonesia, antara lain melalui:

- a. Peningkatan usaha peternakan dengan peningkatan kapasitas/skala usaha, penyediaan skema permodalan, pengembangan asuransi ternak, pengembangan investasi;
- b. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, desiminasi teknologi tepat guna dan penyuluhan, penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran);
- c. Pengembangan dan penerapan standar mutu dan penerapan tata cara pasca panen dan pengolahan hasil peternakan yang baik, sertifikasi dan ijin edar produk, perbaikan sistem logistik, pengembangan informasi; serta
- d. Pengembangan pasar domestik dan internasional.

3. Tujuan

Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, yaitu: "**Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing**"

Produk peternakan harus bernilai tambah dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi produk peternakan tersebut dan meningkatkan pendapatan peternak. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai peternakan, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk

setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- a. Meningkatnya Mutu Hasil Peternakan (IKSP Indeks Mutu komoditas peternakan (Indeks)).
- b. Meningkatnya Volume Ekspor hasil peternakan (IKSP Volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan (Ton)).
- c. Meningkatnya Pengolahan Hasil Peternakan (IKSP Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan (Indeks)).

Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2025-2029. Penjabaran tersebut dipetakan pada Tujuan dan Indikator Tujuan dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Hilirisasi hasil peternakan yang berdaya saing, bernilai tambah dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan usaha peternakan2. Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui pascapanen dan pengolahan3. Meningkatkan hasil peternakan yang bermutu dan berkelanjutan4. Meningkatkan daya saing pemasaran hasil peternakan di pasar domestik dan ekspor	Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks mutu komoditas peternakan (Indeks)2. Volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan (Ton)3. Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan (Indeks)

B. Program, Kegiatan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Sasaran Program (SP) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional, sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat

kualitatif/kuantitatif. Sasaran Program ini kemudian diturunkan (cascading) menjadi sasaran kegiatan.

Sasaran Kegiatan terkait Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Pertanian pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, dimana Sasaran Program (SP) merupakan kinerja strategis subsektor yang diturunkan dari kinerja strategis sektor atau *Critical Success Factor* (CSF) dari setiap *final outcome*.

1. Program

Ditjen PKH memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
- b. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- c. Program Dukungan Manajemen.

2. Kegiatan

Direktorat Hilirnak mengampu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan.

3. Sasaran Program

Program Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan yaitu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, mendukung 4 (empat) indikator kinerja sasaran program Ditjen PKH. Keempat sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Ditjen PKH yaitu:

a. Sasaran Program : Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak.

Perkembangan harga rata-rata produk peternakan yang diterima oleh peternak dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan perubahan harga jual produk peternakan seperti daging, telur, susu. Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa peternak menerima harga yang lebih baik untuk produk mereka.

Sasaran Program ini diukur melalui indikator **Indeks harga yang diterima peternak**. Indeks harga yang diterima peternak adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga komoditas hasil ternak yang diterima oleh peternak dalam suatu periode waktu tertentu. Jika indeks meningkat, harga yang diterima peternak mengalami

kenaikan dibandingkan tahun dasar, dan sebaliknya. Cakupan hanya berfokus pada harga yang diterima oleh peternak kecil dan menengah bukan perusahaan besar. Komoditas yang dihitung didalamnya adalah adalah ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak (sesuai dengan kuisioner BPS).

b. Sasaran Program : Terjaminnya mutu komoditas peternakan

Sasaran program terjaminnya mutu komoditas peternakan ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan mutu terhadap komoditas peternakan melalui pendampingan penerapan dan pengawasan standar mutu hasil peternakan secara konsisten di seluruh rantai pasok. Pelaksanaan program difokuskan pada peningkatan kesesuaian produk hasil peternakan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis Minimal (PTM) serta ketentuan atau standar mutu yang berlaku lainnya.

Upaya pencapaian sasaran dilakukan melalui kegiatan pendampingan penerapan dan pengawasan terhadap pelaku usaha hasil peternakan, penguatan laboratorium pengujian mutu, peningkatan sistem sertifikasi mutu, serta pengembangan sistem jaminan mutu dan ketertelusuran (*traceability*) produk hasil peternakan. Dengan tercapainya sasaran ini, diharapkan mutu komoditas peternakan nasional dapat terjamin, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk peternakan Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional.

Sasaran program ini diukur melalui indikator **Indeks Mutu Komoditas Peternakan**, yang merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas produk peternakan berdasarkan parameter mutu (fisik, kimia, atau biologis yang relevan). Indeks ini dihitung dengan membandingkan nilai karakteristik produk terhadap standar mutu acuan, sehingga mencerminkan kesesuaian mutu produk dengan kriteria yang ditetapkan. Standar mutu yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar lain yang relevan. Jenis komoditas dalam pengukuran indeks mutu adalah daging, susu, telur, madu, Sarang Burung Walet (SBW) dan pupuk organik.

c. Sasaran Program : Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan

Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan peningkatan jumlah komoditas peternakan yang berhasil dieksport ke negara tujuan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan peran pemerintah dan stakeholder dalam membuka akses pasar, memenuhi persyaratan negara tujuan dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan kontribusi subsektor peternakan terhadap nilai perdagangan internasional semakin meningkat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok produk peternakan yang berdaya saing.

Sasaran Program ini diukur dengan indikator **Volume ekspor komoditas peternakan**. Indikator ini menggambarkan total volume komoditas peternakan yang berhasil dieksport dalam periode tertentu yaitu kelompok komoditas hewan hidup, produk pangan, produk non pangan, obat hewan serta benih dan bibit ternak sesuai dengan standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan teknis negara tujuan. Secara strategis, indikator volume ekspor komoditas peternakan berkontribusi langsung terhadap peningkatan devisa negara sekaligus mendukung pengembangan produk peternakan berdaya saing global.

d. Sasaran Program : Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi

Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah produk ternak dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah melalui pengolahan, diversifikasi, dan/atau penguatan rantai pasok, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor atau mengurangi ketergantungan impor.

Sasaran program ini diukur melalui indikator **Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan**. Indikator ini mengukur indeks kinerja jumlah komoditas peternakan unggulan prioritas yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan parameter adanya peningkatan

ketersediaan komoditas unggulan prioritas hasil hilirisasi (volume dan/atau jenis produk), nilai tambah yang didapat pasca hilirisasi komoditas unggulan prioritas, dan rasio komoditas peternakan hasil hilirisasi yang diekspor terhadap total komoditas peternakan unggulan hasil hilirisasi; dibandingkan total komoditas peternakan unggulan. Komoditas peternakan unggulan meliputi daging sapi, daging ayam, susu, telur, dan SBW

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah pihak atau hasil spesifik yang dituju dan diharapkan untuk menerima manfaat atau tercapai dari pelaksanaan suatu kegiatan, yang merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan umum untuk memberikan fokus dan arah yang jelas pada tindakan yang akan dilakukan.

Sasaran kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan merupakan penjabaran dari Sasaran Program Ditjen PKH. Sasaran kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. **Sasaran Kegiatan: Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan**

Sasaran kegiatan tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan oleh usaha peternakan merupakan upaya strategis untuk menjamin terserapnya produksi peternakan nasional secara berkelanjutan. Akses pasar, salah satunya dapat mencakup terbentuknya kemitraan usaha, tersedianya saluran distribusi dan pemasaran, serta kepastian regulasi dan persyaratan teknis yang memungkinkan pelaku usaha peternakan memasarkan produknya secara optimal.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan**. Indikator ini mengukur seberapa efektif usaha peternakan dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia (akses pasar yang didapat) untuk menjual hasil produksinya.

Secara matematis, indikator ini dinyatakan sebagai persentase dengan membandingkan antara total akses pasar yang didapat dibandingkan dengan akses pasar yang dimanfaatkan. Jika persentase tinggi

(mendekati 100%) maka terjadi efisiensi dan pemanfaatan pasar yang baik dengan memaksimalkan saluran pemasaran yang tersedia serta kemampuan untuk memenuhi permintaan dari hampir semua akses pasar yang dimiliki.

b. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu

Sasaran kegiatan terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu ini dimaksudkan untuk mewujudkan komoditas hasil peternakan yang memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan meliputi pendampingan penerapan standar mutu di UPH, pengawasan mutu produk peternakan beredar/siap edar, fasilitasi sertifikasi mutu produk untuk UPH peternakan, peningkatan kapasitas SDM pengawas mutu di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas SDM di UPH peternakan dan fasilitasi pengujian mutu produk di laboratorium. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta produk peternakan yang bermutu dan berdaya saing tinggi, serta mampu mendukung peningkatan nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap produk hasil peternakan nasional.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar**. Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan yang siap edar merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pemenuhan persyaratan mutu produk peternakan siap edar berdasarkan parameter mutu non keamanan pangan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Ruang lingkup komoditas mencakup komoditas prioritas untuk mendukung program pemerintah, khususnya Makan Bergizi (MBG), dengan indikator/parameter yang digunakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku, antara lain : SNI 9226:2023 Karkas dan Daging Sapi/Kerbau, SNI 3924:2023 Karkas dan Daging Ayam Ras, SNI 3926:2023 Telur Ayam Konsumsi, dan/atau SNI 3141:2024 Susu Mentah.

Penilaian dilakukan terhadap parameter mutu non keamanan pangan yang tercantum dalam SNI, baik parameter kualitatif maupun kuantitatif. Tingkat pemenuhan setiap parameter ditentukan berdasarkan kesesuaian hasil uji mutu produk dan atau hasil pengawasan pre market dan atau post market terhadap ketentuan standar. Persentase pemenuhan dihitung dari perbandingan jumlah sampel yang memenuhi persyaratan terhadap total sampel yang diuji, dan nilai persentase akhir dilaporkan sebagai nilai rata rata dari seluruh parameter mutu non keamanan pangan yang dinilai.

c. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor

Secara kegiatan meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor menjadi salah satu prasyarat dalam pemanfaatan akses pasar yang terbuka, peningkatan volume, diversifikasi ekspor, serta penguatan daya saing produk peternakan nasional. Sasaran kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, serta peningkatan kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian nasional.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan**. Indikator ini mengukur sejauh mana kesiapan produk peternakan nasional untuk memasuki pasar ekspor dibandingkan dengan total potensi ekspor yang tersedia. Produk siap ekspor merujuk pada komoditas peternakan yang telah memenuhi standar mutu, keamanan pangan, persyaratan teknis serta ketentuan negara tujuan ekspor, sedangkan total potensi ekspor mencakup keseluruhan total volume atau jenis produk peternakan yang berpotensi diekspor.

d. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing

Sasaran kegiatan meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing dicapai dengan upaya meningkatkan jenis dan/atau volume produk olahan hasil peternakan unggulan melalui kegiatan pasca panen dan pengolahan; dengan memperhatikan efisiensi dan preferensi pasar untuk meningkatkan daya saing.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan**. Indikator ini merupakan rasio dalam persentase dari jumlah komoditas bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas yang diprioritaskan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah dan berdaya saing melalui pascapanen dan/atau pengolahan pada tahun berjalan; dibandingkan total komoditas peternakan unggulan adalah susu, daging, telur, sarang burung walet dan madu.

e. **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan**

Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan ukuran nilai investasi baru maupun perluasan yang berasal dari PMA dan PMDN di bidang peternakan dan kesehatan hewan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan**. Indikator ini mengukur persentase perkembangan investasi peternakan di bandingkan periode sebelumnya secara kumulatif. Salah satu upaya dalam mendorong peningkatan investasi dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan kepada calon investor maupun investor eksisting yang melakukan perluasan usahanya dengan fasilitasi kemudahan investasi mulai dari pemilihan lahan, perizinan NIB, perizinan dasar (KKPR, PBG-SLF, lingkungan), perizinan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan investasi serta penyiapan skema insentif yang dapat dimanfaatkan oleh para investor.

Secara rinci sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan tahun 2025 tersebut sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK 1. Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan	IKSK1.1. Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	%	100
SK.2. Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu	IKSK2.1. Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	%	80
SK 3. Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	IKSK3.1. Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	%	45
SK 4. Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	IKSK4.1. Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	%	20
SK.5. Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	IKSK5.1. Peningkatan investasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	16,26

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada bulan Desember 2024, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PKH T.A. 2025 disahkan. Seiring berjalananya waktu, selama tahun 2025 dilakukan 3 (tiga) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu:

1. Revisi I pada bulan Februari 2025 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur unit kerja dari semula Direktorat Pengolahan dan pemasaran Hasil Peternakan menjadi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan;
2. Revisi II pada bulan Oktober 2025 disebabkan:
 - a. Perubahan target indikator “ Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan” yang semula 95% menjadi 100% sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- bahwa target kinerja tahun berjalan untuk disesuaikan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
- b. Perubahan target indikator “Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan” yang semula USD 1.290.007.000 menjadi USD 1.300.00.000 USD mengingat capaian kegiatan pada saat itu sudah tinggi.
 3. Pada bulan Desember 2025 seiring dengan terbitnya Renstra Kementan, Renstra Ditjen PKH dan Renstra Direktorat Hilirnak Tahun 2025-2029, dilakukan perubahan PK lagi

Salah satu indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu “Percentase Komoditas Produk Peternakan yang Memenuhi Persyaratan Mutu Terhadap Total Komoditas Produk Peternakan Siap Edar” merupakan turunan langsung dari RPJMN 2025-2029 yang semula volume tertulis 100%, telah diusulkan penurunan target tahun 2025 menjadi 80% ke Bappenas, namun Bappenas hanya menyetujui perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP-P) 2026 mengingat RKP 2025 sudah terbit pada tahun 2024, namun pada Renstra Kementan, Renstra Ditjen PKH dan Renstra Direktorat Hilirnak target IKS ini tidak berubah, perubahan hanya di PK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2025 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian metode *scoring* terhadap sasaran yang telah dicapai, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%)
2. Berhasil (capaian 80 - 100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60 - 80%)
4. Kurang berhasil (capaian < 60%)

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Direktorat Hilirnak tahun 2025 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Evaluasi kinerja Direktorat Hilirnak tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian 5 (lima) Indikator Kinerja tersebut diukur melalui maximize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$Capaian\ IKU = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran

Efisiensi Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait.

B. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Direktorat Hilirnak pada tahun 2025 jika dilihat dari masing-masing indikator kinerja, maka 3 (tiga) indikator kinerja termasuk kriteria **sangat berhasil** karena capaiannya lebih besar dari 100%, dan 2 (dua) indikator kinerja termasuk kriteria **berhasil** karena capaiannya 100%. Secara rinci realisasi per indikator dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Hilirnak Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
SK 1. Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan	IKS1.1. Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	%	100	100	100
SK.2. Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu	IKS2.1. Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	%	80	82,77	103,46
SK 3. Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	IKS3.1. Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	%	45	46,37	103,04
SK 4. Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	IKS4.1. Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	%	20	20	100

SK.5. Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	IKS5.1. Peningkatan investasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	16,26	18,15	110,00
--	--	---	-------	-------	--------

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian IKS dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian peningkatan investasi peternakan dan kesehatan hewan tahun 2025 mencapai 18,15% atau 110,00% dari target tahun 2024 sebesar 15,76% dan termasuk kriteria “**sangat berhasil**”.

Target Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar tahun 2025 adalah 80% dengan realisasi 82,77% (103,46%) dan termasuk kriteria “**Sangat berhasil**”.

Target Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan adalah 45% dengan realisasi 46,37% (103,04%) atau “**sangat berhasil**”.

Capaian Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan adalah 100% dari target 100% dan termasuk kriteria “**berhasil**”.

Capaian Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan adalah 100% dan terealisasi 100% dan termasuk kriteria “**berhasil**”.

2. Analisis Kinerja

- a. Indikator Kinerja : Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan

IKU:	
Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	
Target	Realisasi
100%	100%
% Capaian 100 % (Berhasil)	

Berdasarkan data kemitraan unggas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), jumlah kemitraan usaha peternak unggas tercatat sebanyak 27.863 mitra dengan 23 perusahaan integrator dan 9 perusahaan non-integrator. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan (0 laporan) dari pelaku usaha terkait kendala atau permasalahan akses pasar dalam skema kemitraan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh akses pasar yang diperoleh usaha peternakan telah dimanfaatkan secara optimal, sehingga persentase pemanfaatan akses pasar oleh usaha peternakan adalah 100 persen. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kemitraan unggas dalam mendukung pemasaran hasil produksi peternak.

$$\frac{\text{Total Kemitraan} - \text{Jumlah Laporan Kasus Akses Pasar Kemitraan}}{\text{Total Kemitraan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Akses Pasar} = \frac{27.863 \text{ mitra} - 0 \text{ laporan}}{27.863 \text{ mitra}} \times 100\% = 100\%$$

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target kinerja Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dengan kategori “**Berhasil**”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 (Baseline)

Realisasi Indikator kinerja Persentase Akses Pasar yang Dimanfaatkan Usaha Peternakan Terhadap Total Akses Pasar yang Didapat Usaha Peternakan tahun 2025 sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (baseline) sebesar 100% maka tercapai 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja indikator Persentase Akses Pasar yang Dimanfaatkan Usaha Peternakan Terhadap Total Akses Pasar yang Didapat Usaha Peternakan merupakan Tahun 2025 sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka mencapai 100%.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Akses Pasar yang Dimanfaatkan Usaha Peternakan Terhadap Total Akses Pasar yang Didapat Usaha Peternakan Dengan Target Jangka Menengah Kinerja

Target dan Realisasi IKS K	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2025	% Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029			
Target IKS K (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi IKS K (%)	100	-	-	-	-			

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Persentase Akses Pasar yang Dimanfaatkan Usaha Peternakan Terhadap Total Akses Pasar yang Didapat Usaha Peternakan tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional karena berbeda komoditas.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator kinerja Persentase Akses Pasar yang Dimanfaatkan Usaha Peternakan terhadap Total Akses Pasar yang Didapat Usaha Peternakan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh akses pasar yang diperoleh usaha peternakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, tidak terdapat kendala maupun faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaannya, karena pelaksanaan program dan dukungan kebijakan telah berjalan efektif dan selaras dengan sasaran yang direncanakan.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dan nilai efisiensi capaian kegiatan pendukung kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagaimana pada Lampiran 4.

7) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kinerja Indikator Persentase Akses Pasar yang Dimanfaatkan Usaha Peternakan Terhadap Total Akses Pasar yang Didapat Usaha Peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Kesesuaian perjanjian dan realisasi kemitraan.
Pelaksanaan kemitraan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara peternak dan pelaku usaha.
- Peningkatan permintaan produk unggas.
Meningkatnya permintaan pasar mendorong kemudahan akses pasar bagi produk unggas.
- Preferensi konsumen terhadap produk unggas.

Konsumen cenderung memilih unggas karena harganya lebih terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lainnya, sehingga penyerapan pasar menjadi lebih optimal.

- b. Indikator Kinerja : Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar

IKU:	
Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	
Target	Realisasi
80%	82,77%
% Capaian 103,46% (Sangat Berhasil)	

Indikator Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar merupakan turunan langsung dari RPJMN 2025-2029.

Data bersumber dari Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dan dihitung dengan cara sebagai berikut: Menetapkan parameter mutu dan sampel yang dinilai, kemudian menilai pemenuhan parameter mutu. Setelah itu hitung dengan rumus:

$$\text{Presentase pemenuhan mutu} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{S_i}{N} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

S_i = jumlah sampel yang memenuhi parameter ke-i

N = total sampel yang diuji

n = jumlah parameter mutu non keamanan pangan

Parameter diidentifikasi kemudian ditetapkan (dipilih) parameter mutu non keamanan pangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang tercantum dalam SNI yang digunakan untuk masing-masing komoditas, serta ditetapkan jumlah sampel produk peternakan siap edar yang akan

dilakukan pengujian mutu dan atau pengawasan pre market dan atau post market.

Pada tahun 2025, komoditas peternakan unggulan prioritas hilirisasi adalah komoditas susu, sejalan dengan upaya percepatan peningkatan populasi melalui investasi sapi perah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Target Persentase Pemenuhan Mutu = 80 %

$$\text{Realisasi} = \frac{\sum_{i=1}^n (S_i/N \times 100\%)}{n}$$

$$\begin{aligned} & [(4/5 \times 100\%) + (16/17 \times 100\%) + (26/30 \times 100\%) + (18/18 \times 100\%) \\ & = \frac{[(4/5 \times 100\%) + (16/17 \times 100\%) + (26/30 \times 100\%) + (18/18 \times 100\%) + (22/30 \times 100\%) + (10/16 \times 100\%)]}{6} \\ & = \frac{[(80\% + 94,12\% + 86,67\% + 100\% + 73,33\% + 62,5\%)]}{6} \\ & = \frac{(496,62\%)}{6} \\ & = \mathbf{82,77\%} \end{aligned}$$

Realisasi = 82,77% / 80%

Capaian = **103,46 % (Sangat Berhasil)**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target kinerja Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 82,77 % atau mencapai 103,46% dengan kategori "**Sangat Berhasil**".

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar merupakan indikator baru pada Renstra 2025-

2029 sehingga data tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar Tahun 2025 sebesar 82,77%, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 sebesar 100 %, maka mencapai 82,77%.

Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar dengan target jangka menengah kinerja

Target dan Realisasi IKS K	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2025	% Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029			
Target IKS K (%)	100	100	100	100	100	82,77	-	82,77
Realisasi IKS K (%)	82,77	-	-	-	-			

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar tahun 2025 sebesar 82,77%, apabila dibandingkan dengan standar nasional (RPJMN Tahun 2025-2029) sebesar 100 %, maka mencapai 82,77%.

Target indikator Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar berdasarkan RPJMN 2025-2029 sebesar 100%.

Direktorat Hilirisasi Hasil peternakan mengusulkan penyesuaian target menjadi 80% pada tahun 2025 dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Target IKSK ini merupakan target/indikator baru yang belum ada baseline data capaian sebelumnya.
- Pemenuhan standar mutu (SNI/PTM) untuk produk peternakan masih bersifat sukarela (*voluntary*) atau belum wajib (*mandatory*).
- Belum semua OPD/Dinas daerah, baik Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki data produk UPH siap edar yang memenuhi standar mutu, sehingga diperlukan penyesuaian target dan nomenklatur target (menghilangkan kata-kata siap edar).

Berkaitan dengan hal tersebut Ditjen PKH telah bersurat ke Bappenas dengan surat Nomor: 08148/RC.110/F.1/12/2025 tanggal 8 Desember 2025 untuk merevisi target ini, namun Bappenas hanya mengakomodir usulan ini pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 mengingat RKP 2025 telah terbit pada tahun 2024.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pendampingan penerapan dan pengawasan mutu hasil peternakan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha (koperasi susu) terhadap standar mutu yang berlaku, serta tersedianya data hasil uji mutu yang memadai sebagai dasar penghitungan persentase.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dan nilai efisiensi capaian kegiatan pendukung kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagaimana pada Lampiran 4.

7) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan kinerja persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Pendampingan penerapan standar mutu hasil peternakan kepada pelaku usaha;
- Pelaksanaan pengawasan mutu komoditas peternakan pada rantai pasok;
- Pengujian mutu produk peternakan, baik melalui uji cepat maupun laboratorium pengujian;
- Sosialisasi regulasi dan standar mutu produk peternakan;
- Penguatan sistem jaminan mutu dan ketertelusuran produk hasil peternakan.
- Koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait, khususnya dengan industri sebagai offtaker produk peternakan.

c. Indikator Kinerja : Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan

IKU: Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	
Target 45%	Realisasi 46,37%
% Capaian 103,04% (Sangat Berhasil)	

Data bersumber dari data proyeksi produksi Ditjen PKH, data proyeksi konsumsi dalam negeri, BPS dan statistik Ditjen PKH dan diukur dengan jumlah produksi adalah total produksi unggas dan jumlah produksi SBW pada tahun berjalan, jumlah produksi SBW berdasarkan asumsi rata-rata volume ekspor (ton), dan jumlah konsumsi unggas dalam negeri berdasarkan konsumsi perkapita/tahun atau kebutuhan dalam negeri/tahun.

$$\frac{\text{Jumlah Produksi} - \text{Jumlah Konsumsi}}{\text{Jumlah Produksi}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, produksi Sarang Burung Walet (SBW) mencapai 1.340 ton, dengan realisasi ekspor sebesar 1.218 ton, sehingga persentase produk komoditas peternakan yang siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan mencapai 90,89 persen. Sementara itu, produksi unggas tercatat sebesar 10,83 juta ton, dengan tingkat konsumsi domestik sebesar 10,63 juta ton, sehingga persentase produk komoditas peternakan yang siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan berada pada angka 1,85 persen.

$$\text{Sarang Burung Walet} = \frac{1.340 \text{ ton} - 1.218 \text{ ton}}{1.340 \text{ ton}} \times 100\% = 90,89\%$$

$$\text{Unggas} = \frac{10,83 \text{ juta ton} - 10,63 \text{ juta ton}}{10,83 \text{ juta ton}} \times 100\% = 1,85\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{90,89\% + 1,85\%}{2} = 46,37\%$$

Rata-rata persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan tahun 2025 adalah 46,37%.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target kinerja Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan tahun 2025 sebesar 45% dengan realisasi sebesar 46,37% atau mencapai 103,04% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 (Baseline)

Realisasi indikator kinerja Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan tahun 2025 sebesar 46,37%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (baseline) sebesar 40% maka tercapai 115,93% atau meningkat 15,93%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan Tahun 2025 sebesar 103,04%, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 sebesar 65 %, maka mencapai 71,34%.

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan dengan target jangka menengah kinerja

Target dan Realisasi IKS K	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2025	% Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029			
Target IKS K (%)	45	50	55	60	65	103,04	115,93	71,34
Realisasi IKS K (%)	46,37	-	-	-	-			

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan tidak bisa dibandingkan progress capaiannya dengan standar nasional karena berbeda komoditas.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator kinerja Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak terdapat kendala maupun faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaannya, karena pelaksanaan program dan dukungan kebijakan telah berjalan efektif dan selaras dengan sasaran yang direncanakan

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dan nilai efisiensi capaian kegiatan pendukung kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagaimana pada Lampiran 4.

7) Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Kinerja Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Kapasitas dan kontinuitas produksi.
Ketersediaan volume produksi yang memadai dan berkelanjutan menjadi dasar pemenuhan pasar ekspor.
- Pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.
Produk yang memenuhi standar kesehatan hewan, keamanan pangan, dan persyaratan sanitary and phytosanitary (SPS) negara tujuan lebih siap untuk diekspor.
- Permintaan dan akses pasar internasional.
Tingginya permintaan global serta terbukanya akses pasar di negara mitra mendorong peningkatan produk siap ekspor.
- Kebijakan dan fasilitasi pemerintah.
Dukungan regulasi, perizinan, diplomasi perdagangan, serta promosi ekspor mempercepat kesiapan produk peternakan untuk ekspor.

- d. Indikator Kinerja : Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan

IKU:	
Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	
Target 20 %	Realisasi 20 %
	% Capaian 100 % (Berhasil)

Indikator ini merupakan rasio dalam persentase dari jumlah komoditas bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas yang diprioritaskan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah dan berdaya saing melalui pascapanen dan/atau pengolahan pada tahun berjalan; dibandingkan total komoditas peternakan unggulan. Total komoditas peternakan unggulan adalah 5 komoditas, yaitu daging ayam, daging sapi, susu, telur dan sarang burung wallet.

Pada tahun 2025, komoditas yang diprioritaskan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah dan berdaya saing melalui pascapanen dan/atau pengolahan adalah **1 komoditas, yaitu susu**. Hal ini selaras dengan upaya akselerasi investasi sapi perah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mendorong pelaku usaha swasta untuk berinvestasi pada peternakan sapi perah terintegrasi dan/atau melakukan kemitraan dengan para peternak.

Rumus pengukuran indikator kinerja persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah komoditas yang bernilai tambah dan berdaya saing}}{\text{Jumlah komoditas peternakan unggulan}} \times 100\%$$

$$= (1 : 5) \times 100 \% = 20 \%$$

Jumlah komoditas bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas yang diprioritaskan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah dan berdaya saing melalui pascapanen dan/atau pengolahan pada tahun berjalan, yaitu komoditas susu.

Pada tahun 2025 dari pembinaan dan pendampingan 16 unit usaha pengolahan baik yang baru maupun yang sudah ada, terdapat peningkatan ketersediaan susu pasteurisasi sebesar 4,7 juta liter. Ragam jenis produk yang diolah atau diversifikasi produk olahan susu juga meningkat. Sebelumnya susu segar hanya diolah menjadi susu pasteurisasi dan yogurt. Pada tahun 2025 terjadi penambahan diversifikasi/ragam jenis produk olahan susu berupa keju dan es krim di 5 unit usaha.

Dari 16 unit usaha pengolahan baik yang baru maupun yang sudah ada dimaksud semuanya memproduksi susu pasteurisasi, untuk itu nilai tambah diukur pada peningkatan nilai tambah pada produk susu pasteurisasi, yaitu rata-rata sebesar 13.843/liter, atau senilai Rp.65.919.743.055 (65,9 Miliar rupiah).

Selain itu, secara nasional dampak positif dari keberhasilan dalam hilirisasi hasil peternakan dapat dilihat dari meningkatnya unit pengolahan susu (UPH) yang mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPH Susu yang mendapat sertifikas NKV (berbagai level) sebanyak 38 unit (Lampiran 5), sedangkan pelaku usaha yang pada tahun 2025 produk susu (utamanya susu pasteurisasi dan UHT) yang mendapatkan izin edar MD dari BPOM sebanyak 26 pelaku usaha, data sebagaimana Lampiran 6.

Pada tahun 2025, komoditas peternakan unggulan prioritas hilirisasi adalah komoditas susu, Hal ini selaras dengan upaya akselerasi investasi sapi perah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mendorong pelaku usaha swasta untuk berinvestasi pada peternakan sapi perah terintegrasi dan/atau melakukan kemitraan dengan para peternak. Komoditas susu juga memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting serta peningkatan kesehatan dan kecerdasan bangsa.

Peningkatan ketersediaan dan keberagaman produk olahan susu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi dan protein hewani masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target kinerja Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan tahun 2025 sebesar 20% dengan realisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dengan kategori “Berhasil”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan merupakan indikator baru pada Renstra 2025-2029 sehingga data tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan tahun 2025 sebesar 20%, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 sebesar 100%, maka mencapai 20%.

Tabel 10. Perbandingan realisasi kinerja persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan dengan target jangka menengah kinerja

Target dan Realisasi IKS	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2025	% Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029			
Target IKS (%)	20	40	60	80	100	100	-	20
Realisasi IKS (%)	20	-	-	-	-			

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional (Kementerian)

Pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian periode 2025-2029, sasaran strategis yang terkait dengan indikator Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan adalah SS 4, yaitu meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan dengan indikator kinerja IKSS 4.1, yaitu indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan (Indeks); dengan target tahun 2025 sebesar 0,23 indeks.

Capaian indikator persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan pada Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mendukung capaian kinerja indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana pada tahun 2025 tercapai sebesar 0,2 indeks, apabila dibandingkan dengan target indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan di tingkat Kementerian Pertanian tahun 2025, yaitu sebesar 0,23 indeks, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan berkontribusi sebesar 86,9%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Secara umum keberhasilan dari hilirisasi hasil peternakan susu pada tahun 2025 ini sebagai cerminan dari beberapa upaya dan kondisi yang dicapai dalam persusuan nasional seperti:

- Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan
- Penguatan industri pengolahan susu
- Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
- Dukungan kebijakan dan program pemerintah
- Peningkatan daya saing produk
- Penguatan rantai pasok dan logistik
- Akses pasar dan promosi ekspor
- Sinergi multipihak

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dan nilai efisiensi capaian kegiatan pendukung kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagaimana pada Lampiran 4.

7) Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan indikator kinerja Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan dipengaruhi oleh kebijakan dan beberapa beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya hilirisasi komoditas peternakan unggulan utamanya hilirisasi hasil peternakan susu pada tahun 2025 di dukung kebijakan Direktorat Jenderal PKH dalam akselerasi produksi susu dengan peningkatan peran swasta termasuk peternak UMKM dan koperasi melalui investasi dan kemitraan usaha peternakan, program MBG, serta pembinaan dan pendampingan pascapanen dan pengolahan hasil peternakan. Pendampingan juga dilaksanakan melalui pengawalan penyerapan susu untuk program MBG dan dalam proses memperoleh sertifikasi dan izin edar produk susu.

e. Indikator Kinerja : Peningkatan Investasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

IKU: Peningkatan Investasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 16,26 %	Realisasi 18,15 %
% Capaian 110,00 % (Sangat Berhasil)	

Target realisasi investasi tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan *baseline* 2024 yaitu sebesar **15,76%**. Pada tahun tersebut, bidang usaha kesehatan hewan belum termasuk dalam perhitungan realisasi investasi karena KBLI bidang kesehatan hewan belum menjadi kewenangan Kementerian Pertanian. Pengukuran peningkatan

investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan menggunakan rumus berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah PMA dan PMDN tahun berjalan} - \text{Jumlah PMA dan PMDN tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah PMA dan PMDN tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Investasi PMA pada tahun 2025 mencapai 0,752 triliun rupiah dan investasi PMDN mencapai 3,761 triliun rupiah, sehingga investasi tahun 2025 mencapai 4,513 triliun rupiah. Pada tahun 2024, Investasi PMA mencapai 0,258 triliun rupiah dan investasi PMDN mencapai 3,562 triliun rupiah, sehingga total investasi tahun 2024 mencapai 3,820 triliun rupiah. Dengan menggunakan rumus peningkatan investasi di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan investasi tahun 2025 sebesar 18,15%.

$$\begin{aligned} &= \frac{(0,752 + 3,761 \text{ triliun rupiah}) - (0,258 + 3,562 \text{ triliun rupiah})}{(0,258 + 3,562 \text{ triliun rupiah})} \times 100\% \\ &= \frac{4,513 \text{ triliun rupiah} - 3,820 \text{ triliun rupiah}}{3,820 \text{ triliun rupiah}} \times 100\% \\ &= 18,15\% \end{aligned}$$

Tabel 11. Realisasi Investasi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Periode Investasi	Realisasi Investasi (triliun rupiah)		
	PMA	PMDN	Total Investasi
Tahun 2024	0,258	3,562	3,820
Tahun 2025	0,752	3,761	4,513
Realisasi peningkatan investasi 2025 (year on year)			18,15%

Sumber : BKPM, diolah oleh Dit. Hilirnak, 2025

Pada tahun 2025, terdapat penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru yang semula bukan kewenangan Kementerian Pertanian yaitu bidang kesehatan hewan senilai 0,69 triliun rupiah sehingga realisasi investasi keseluruhan menjadi 29,78%.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target kinerja peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan tahun 2025 sebesar 16,26% dengan realisasi sebesar 18,15% atau mencapai 110,00% dengan kategori “**sangat berhasil**”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan tahun 2025 sebesar 18,15%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 15,76%, maka investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan meningkat 15,16%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan tahun 2025 sebesar 18,15%, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025-2029 sebesar 18,26%, maka mencapai 99,40%.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi IKS K	Tahun					% Realisasi terhadap Target 2025	% Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024	% Realisasi Terhadap Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029			
Target IKS K (%)	16,26	16,76	17,26	17,76	18,26			
Realisasi IKS K (%)	18,15	-	-	-	-	111,61	115,76	99,39

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Ditjen PKH dengan Standar Nasional (Kementerian)

Indikator kinerja peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional karena hanya merupakan indikator Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Secara keseluruhan, investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan mengalami peningkatan. Analisa penyebab keberhasilan sbb:

- Peningkatan investasi didukung oleh upaya pendampingan dan pembinaan kepada calon investor maupun investor eksisting yang melakukan perluasan usahanya dengan fasilitasi kemudahan investasi mulai dari pendampingan pemanfaatan lahan, perizinan NIB, perizinan dasar (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, serta persetujuan lingkungan), perizinan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan investasi serta pengusulan skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor.
- Peningkatan investasi bidang usaha peternakan unggas sebanyak 0,853 triliun rupiah atau sebesar 31,46%. Peningkatan tersebut berasal dari PMA sebesar 0,207 triliun rupiah (120,35%) dan PMDN sebesar 0,646 triliun rupiah (25,44%). Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa peningkatan bidang usaha peternakan unggas yang berasal dari PMDN memberikan kontribusi terbesar. Investasi baru dan perluasan yang dilakukan oleh pelaku usaha unggas dalam negeri disinyalir terjadi sebagai respon dari adanya peningkatan permintaan produk unggas terutama untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, program MBG menjadi stimulus yang berdampak positif bagi iklim investasi peternakan unggas nasional.

- Pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau, terjadi penurunan jumlah investasi gabungan PMA dan PMDN sebanyak 0,272 triliun rupiah atau sebesar 40,29%. Investasi PMDN pada bidang usaha tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,469 triliun rupiah atau sebesar 75,16%. Namun di sisi lain, investasi PMA mengalami peningkatan sebanyak 0,197 triliun rupiah atau sebesar 386,27%.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dan nilai efisiensi capaian kegiatan pendukung kegiatan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan sebagaimana pada Lampiran 4.

7) Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Kinerja

Peningkatan investasi PMA pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau disinyalir sebagai dampak positif dari upaya peningkatan investasi sapi perah dan sapi pedaging yang bertujuan untuk mempercepat produksi susu dan daging nasional. Di sisi lain, investasi PMDN bidang usaha peternakan sapi dan kerbau mengalami penurunan diakibatkan pelaku usaha sapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena terbatasnya modal dan akses pembiayaan. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan investasi PMDN pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau, diperlukan fasilitasi akses pembiayaan yang sesuai dengan profil usaha sapi.

C. Kinerja Kegiatan Strategis

1. Pendampingan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Pertanian melakukan upaya peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong dengan meningkatkan investasi oleh pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mendukung percepatan penyediaan daging dan susu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membentuk Tim Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging berdasarkan Keputusan Nomor 3222/Kpts/OT.050/F/03/2025.

Perkembangan investasi yang telah dilakukan pendampingan oleh Ditjen PKH oleh para pelaku usaha yang akan mendatangkan sapi indukan baik perah maupun pedaging pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemasukan sapi perah pada tahun 2025-2029 sebanyak 998.565 ekor dari 196 pelaku usaha dan komitmen pemasukan sapi pedaging sebanyak 577.103 ekor dari 84 pelaku usaha. Komitmen pemasukan sapi perah pada tahun 2025 sebanyak 48.754 ekor dari 193 pelaku usaha dan pemasukan sapi pedaging sebanyak 52.594 ekor dari 86 pelaku usaha.
- b. Total realisasi pemasukan sapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 33.955 ekor yang terdiri dari 13.544 ekor sapi perah oleh 72 pelaku usaha dan 20.411 ekor sapi pedaging oleh 68 pelaku usaha.
- c. Investor, baik pendanaan yang berasal dari PMA maupun PMDN, telah berupaya untuk berkomitmen dalam mengembangkan usaha peternakan sapi namun dalam prosesnya terkendala beberapa hal, antara lain:
 - Terbatasnya ketersediaan lahan yang *clean* dan *clear*;
 - Proses perizinan usaha yang panjang;
 - Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan;
 - Ketidaksiapan infrastruktur dasar;
 - Keterbatasan pasokan sapi di negara asal; dan
 - Tingginya harga sapi di negara asal.

2. Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi

Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi dirancang sebagai sebuah kerangka pembangunan komprehensif yang menghubungkan seluruh rantai nilai perunggasan dari hulu hingga hilir. Program ini akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai representasi dari negara hadir langsung dalam pembentukan ekosistem perunggasan yang baik. Konsep ini dibangun dengan pendekatan integrasi vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa seluruh simpul produksi, distribusi, dan pengolahan berada dalam satu kesatuan ekosistem yang efisien, terukur, dan mampu menghasilkan output yang berkelanjutan.

Pendekatan ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan besar dalam industri perunggasan nasional, mulai dari ketergantungan bahan baku impor, fluktuasi harga, ketidakseimbangan pasokan, hingga kualitas infrastruktur yang belum merata.

Telur dan daging ayam merupakan sumber utama protein hewani masyarakat serta komoditas strategis dalam menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Pada tahun 2024, produksi nasional telur dan daging ayam secara agregat berada dalam kondisi surplus, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan pasokan dan harga antarwilayah. Disparitas produksi dan distribusi masih terjadi, terutama antara wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, yang berdampak pada fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) memerlukan tambahan pasokan telur dan daging ayam dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, kedua komoditas tersebut diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah, sementara angka stunting nasional masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan industri hulu dan hilir secara merata dan berkelanjutan.

a. Permasalahan

Permasalahan utama dalam pengembangan sektor perunggasan nasional adalah ketimpangan produksi telur dan daging ayam antarwilayah, khususnya di luar Pulau Jawa, yang mengakibatkan ketergantungan pasokan dari wilayah tertentu. Kondisi ini memicu disparitas harga di tingkat konsumen dan berkontribusi terhadap inflasi daerah. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas industri hulu dan hilir perunggasan di daerah menyebabkan rantai pasok tidak efisien dan nilai tambah belum optimal dinikmati oleh peternak.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya konsumsi protein hewani di beberapa wilayah, yang berdampak langsung pada tingginya angka stunting. Akses pembiayaan yang terbatas, khususnya pembiayaan dengan bunga rendah bagi peternak skala kecil dan menengah, turut menghambat pengembangan usaha perunggasan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

b. Tujuan Kebijakan

Kebijakan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan produksi telur dan daging ayam di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung swasembada pangan nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian protein hewani di tingkat provinsi dan pulau melalui konsep “Setiap Pulau Mandiri Protein”, sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan daerah.

Selain itu, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak melalui penguatan industri hulu dan hilir, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka stunting nasional.

c. Arah Kebijakan

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi diarahkan melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk saat ini PTPN III dan PT Berdikari yang dipercaya sebagai pelaksana, sebagai penggerak utama pembangunan industri perunggasan terintegrasi. Pendanaan bersumber dari BPI Danantara sebesar Rp. 20 triliun yang dikelola BUMN membangun industri dan ekosistem hulu-hilir untuk memastikan kesinambungan produksi dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan bibit, pakan, pemotongan, penyimpanan, dan pengolahan produk.

Kebijakan ini akan didukung oleh penyediaan pembiayaan yang terjangkau melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan dengan bunga sebesar 3 persen, yang dipersiapkan untuk peternak rakyat yang akan menjadi mitra budidaya. Pengembangan fasilitas industri perunggasan dilakukan secara terintegrasi dan difokuskan pada pemerataan wilayah, terutama di 29 provinsi di luar Pulau Jawa dan Jawa Timur. Selain itu, dukungan input strategis diperkuat melalui produksi Grand Parent Stock (GPS) oleh BUMN dan penyediaan vaksin serta obat hewan oleh BBVF Pusvetma.

d. Output Kebijakan

Implementasi kebijakan ini diarahkan pada pembangunan 323 unit fasilitas industri perunggasan hulu dan hilir yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut mencakup pabrik pakan, kandang GPS, Parent Stock (PS), dan pullet, rumah potong unggas dan cold storage, pabrik olahan daging ayam dan telur, serta fasilitas produksi vaksin dan obat hewan.

Pembangunan fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok perunggasan nasional, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menjamin ketersediaan telur dan daging ayam secara berkelanjutan di daerah. Dengan demikian, nilai tambah industri perunggasan dapat dinikmati secara lebih merata oleh peternak dan pelaku usaha di daerah.

e. Dampak yang Diharapkan

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi diproyeksikan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Program ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1,46 juta orang serta meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga mencapai Rp81,5 triliun per tahun. Dampak lanjutan dari peningkatan aktivitas ekonomi ini adalah penurunan tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan dan sentra produksi perunggasan.

Di sisi konsumsi, kebijakan ini diharapkan meningkatkan konsumsi telur dari 21,8 kg menjadi 24,6 kg per kapita per tahun serta konsumsi daging ayam dari 13,6 kg menjadi 17,6 kg per kapita per tahun. Peningkatan konsumsi protein hewani tersebut diharapkan berkontribusi langsung terhadap perbaikan status gizi masyarakat dan penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

f. Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi perlu ditetapkan sebagai program prioritas nasional dan didukung oleh percepatan realisasi investasi serta penyaluran KUR khusus peternakan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi produksi dan stabilitas harga agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Integrasi kebijakan hilirisasi ayam terintegrasi dengan program penurunan stunting dan pengendalian inflasi pangan perlu terus diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

g. Perkembangan Pelaksanaan

- Pada tanggal 13 November 2025, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menyampaikan surat permintaan penyusunan dokumen *Pra-Feasibility Study* (Pra-FS) Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi kepada PTPN III (Persero).
- Tindak lanjut dari permintaan tersebut dilakukan melalui kegiatan *workshop* penyusunan Pra-FS pada tanggal 17 November 2025 yang diselenggarakan oleh PTPN III, dengan fokus pada *brainstorming* pengembangan ekosistem perunggasan nasional di lingkungan PTPN Group.
- Pada tanggal 17 November 2025 telah disampaikan surat usulan skema kredit dengan bunga 3 persen kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari dukungan pembiayaan program. Dalam rangka percepatan persiapan pelaksanaan program, pada tanggal 21–23 November 2025, dilakukan survei lokasi di 12 provinsi yang masuk dalam rencana pengembangan Tahap I. Kegiatan survei ini dilaksanakan bersama PTPN Group, Ditjen PKH Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi kesiapan lokasi dan potensi pengembangan.
- Dokumen *Pra-Feasibility Study* Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi kemudian diselesaikan dan diserahkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai konsultan pelaksana kepada Ditjen PKH Kementerian Pertanian pada tanggal 25 November 2025. Selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2025, dokumen Pra-FS tersebut secara resmi disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Kepala Badan Pengelola

Investasi Danantara sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan investasi.

- Pelaksanaan hilirisasi ayam terintegrasi nantinya tidak dilaksanakan sendiri oleh PTPN III, oleh sebab itu pada tanggal 9 Desember 2025, dilaksanakan pertemuan sosialisasi konsep dan pola pelaksanaan hilirisasi ayam terintegrasi yang melibatkan BUMN Pangan, yaitu PTPN III dan PT Berdikari, bersama calon mitra potensial. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta menjajaki skema kemitraan dalam pelaksanaan program pengembangan industri ayam terintegrasi.

Mendukung pelaksanaan program, telah terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1371/Kpts/OT.050/12/2025 pada tanggal 19 Desember 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan Peningkatan Produksi Telur dan Daging Ayam melalui Program Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi. Pembentukan satuan tugas ini dimaksudkan untuk memastikan koordinasi, pengawalan, dan percepatan implementasi program di lapangan.

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian, sebagai bagian dari persiapan implementasi, perlu segera dilaksanakan *groundbreaking*. Untuk itu telah dilaksanakan survei lanjutan pada tanggal 18–20 Desember 2025 di empat provinsi prioritas *groundbreaking*, yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya, menindaklanjuti arahan Bapak Menteri untuk dapat dilaksanakan *groundbreaking* diseluruh calon lokasi, pada periode 28–31 Desember 2025 dilakukan survei tambahan di delapan provinsi lainnya, meliputi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Direncanakan pada akhir bulan Januari 2026 atau awal bulan Februari 2025 akan dilaksanaan *groundbreaking* Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahap I di 12 provinsi. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya implementasi fisik program secara nasional sebagai upaya penguatan industri perunggasan terintegrasi dan pemerataan produksi telur serta daging ayam di seluruh wilayah Indonesia.

Secara paralel saat ini sedang disusun *Feasibility Study* (FS) pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi oleh BPI Danantara. Dokumen ini diperlukan sebagai dasar kebijakan untuk memastikan kesiapan teknis, ekonomi, dan kelembagaan sebelum program diimplementasikan secara bertahap di berbagai wilayah.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Realisasi KUR sektor pertanian pada tahun 2025 senilai 93,30 triliun rupiah. Realisasi KUR subsektor peternakan (tidak termasuk *mixed farming*) sebesar 14,15 triliun rupiah untuk 277.678 debitur. Pada tahun 2025 penyaluran KUR sektor pertanian tidak memiliki target dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk penyaluran KUR tahun 2025. Realisasi KUR Sektor Pertanian tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Penyaluran KUR Sektor Pertanian Tahun 2025

No.	Sektor	Realisasi (triliun rupiah)	%	Jumlah Debitur
1	Tanaman Pangan	21,531	76,89	457.012
2	Holtikultura	7,739	51,60	164.446
3	Perkebunan	36,840	111,63	545.153
4	Peternakan	14,152	58,96	277.678
5	Jasa Pertanian	1,282	0,00	25.873
6	Mixed Farming	11,754	0,00	270.924
Total		93,301	93,30	1.741.086

Sumber: SIKP, Sakura Kementan, 2025

Selain untuk usaha peternakan dimaksud, terdapat realisasi untuk kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (atau *mix-farming* dimana minimal 60% dari akad kredit dimanfaatkan untuk usaha peternakan) sebesar 11,75 triliun rupiah untuk 270.924 debitur, sehingga total KUR untuk usaha peternakan sebesar 25,90 triliun rupiah untuk 548.602 debitur. Secara rinci, realisasi KUR subsektor peternakan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi KUR (triliun rupiah)	13,75	21,12	28,60	20,76	24,26	25,90
Peternakan	10,63	15,54	19,21	14,59	15,45	14,15
Kombinasi Pertanian/ dengan Peternakan (Mixed Farming)	2,72	5,58	9,39	6,16	8,81	11,75
Jumlah Debitur	497.353	678.964	766.724	478.429	540.969	548.602

* Data sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Sumber : SIKP dan SAKURA Kementan

Realisasi KUR subsektor peternakan didominasi untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya kambing domba dan pembibitan dan budidaya ternak perah. Secara rinci nilai dan jumlah debitur KUR untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi Penyaluran KUR Subsektor Peternakan Per Komoditi
Tahun 2025

No	Kode Sektor	Komoditas	Realisasi (triliun rupiah)	Jumlah Debitur
1	012110	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	6,628	135.398
2	012191	Pembibitan dan Budidaya Kambing dan Domba Potong	2,662	69.455
3	012192	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	1,349	21.282
4	012210	Pembibitan dan Budidaya Ternak Babi	1,333	23.813
5	012291	Pembibitan dan Budidaya Unggas	2,178	27.730
Jumlah			14,152	277.678

*Data sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Sumber : SIKP, Sakura Kementan

Skema KUR belum sesuai dengan karakteristik usaha pembibitan dan pembiakan ternak, terutama usaha ternak ruminansia besar yang membutuhkan skema kredit dengan suku bunga 3% dan *grace period* sampai dengan 3 tahun.

Oleh karena itu, pelaku usaha pembibitan dan pemberian ternak belum dapat memanfaatkan KUR yang ada saat ini, dibuktikan dengan belum banyaknya pemanfaatan KUR oleh peternak. KUR *existing* saat ini sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha penggemukan atau jual beli. Berdasarkan hal tersebut, dengan berkoordinasi bersama Kemenko Perekonomian dan akademisi, maka telah dilakukan upaya untuk menyusun naskah akademis sebagai dasar pengusulan Kredit Usaha Peternakan dengan bunga 3% efektif per tahun dan persyaratan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha peternakan sapi dan ayam.

4. Kemitraan Usaha Peternakan

Kegiatan pembinaan dan koordinasi kemitraan usaha peternakan pada tahun 2025 tidak dialokasikan di provinsi. Pembinaan kemitraan telah dilakukan kepada 38 pelaku usaha kemitraan ayam ras pedaging melalui evaluasi kemitraan dengan rincian sebanyak 24 pelaku usaha integrator dan 14 pelaku usaha non-integrator. Evaluasi kemitraan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 8-9 Juli 2025, 21 Agustus 2025 dan 18 November 2025. Selain itu, pembinaan kemitraan juga dilakukan di provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Desember 2025.

Permasalahan umum yang ditemui peternak tidak paham dengan pelaksanaan kemitraan dan tidak memegang surat perjanjian sehingga kemitraan yang berjalan belum sesuai dengan perjanjian, serta pelaksanaannya belum mematuhi regulasi kemitraan yang berlaku. Permasalahan khusus yang ditemui antara lain tidak diaturnya waktu panen dalam perjanjian kemitraan, tidak diaturnya mekanisme pembagian risiko usaha salah satunya adalah resiko akibat keterlambatan panen, perjanjian kemitraan belum diketahui oleh dinas, perjanjian kemitraan belum dilaporkan oleh perusahaan dan peternak ke dinas, dan perusahaan inti masih menjual sebagian besar livebird ke pasar tradisional.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain pelaku usaha melakukan perbaikan perjanjian kemitraan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Ditjen PKH dan melaporkan hasil perbaikannya kepada Ditjen PKH, dan Ditjen PKH melakukan pemantauan terhadap perusahaan inti dalam pelaksanaan perbaikan perjanjian kemitraan serta Perusahaan diharapkan menyampaikan dan melapor perjanjian kemitraan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten dan provinsi.

Pembinaan dan Sosialisasi Kemitraan Usaha Peternakan Komoditas Sapi Perah

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan terhadap Industri Pengolahan Susu (IPS) dan koperasi yang dinilai belum sepenuhnya mengikuti ketentuan regulasi kemitraan usaha peternakan, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai regulasi kemitraan usaha peternakan, khususnya terkait usaha sapi perah. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan menyegarkan materi kepada pelaku usaha terkait regulasi, tujuan, prinsip, perjanjian, pengawasan, dan pelaporan kemitraan. Selain itu juga pelaku usaha juga diberikan informasi terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan yang disampaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa GKSI yang memiliki koperasi anggota sapi perah sebanyak 16 koperasi di Jawa Barat, 14 koperasi di Jawa Tengah, dan 28 koperasi di Jawa Timur, sebagian koperasi belum memiliki perjanjian kerjasama tertulis yang memperjelas hak dan kewajiban serta menjadi acuan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah koperasi akan menyampaikan perjanjian kemitraan untuk direviu dan diberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelaku usaha dan koperasi yang telah dilakukan pembinaan dan koordinasi kemitraan dengan rincian pelaku usaha sebagaimana Lampiran 7.

D. Kinerja Fungsi Teknis

Kinerja fungsi teknis Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) Rincian Output yaitu: (1) Lembaga Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor; (2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan (3) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

1. Lembaga Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor

terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu operasional pemanfaatan kapal ternak, pendampingan investasi dan hilirisasi. Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak

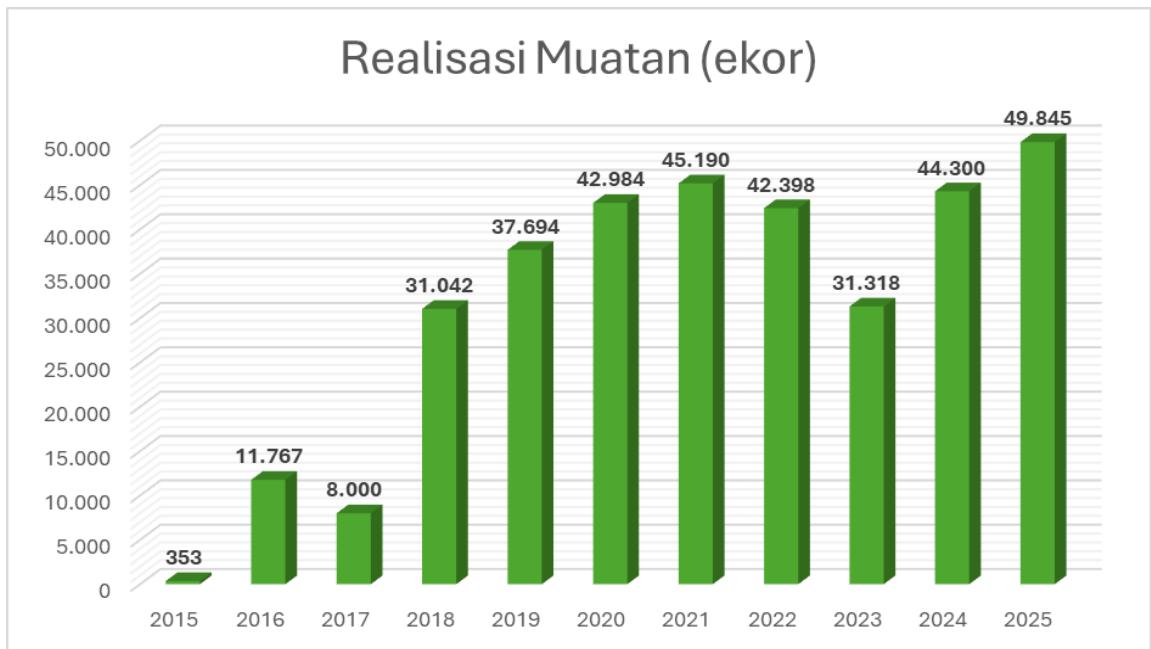
Kesepakatan Menteri Pertanian dengan Menteri Perhubungan telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama terkait penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan transportasi di bidang pertanian Nomor: 03/MoU/HK.220/M/03/2024 dan Nomor: PJ-MHB 3 Tahun 2024.

Ditjen PKH menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PKH dengan Ditjen Perhubungan Laut tentang pemanfaatan kapal laut Nomor: 27104/HK.220/F/11/2025 dan Nomor: HK.201/12/2/DJPL/2025.

Fasilitasi kapal khusus angkutan ternak merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan dan merupakan perwujudan tol laut yang bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Kapal khusus angkutan ternak diharapkan mampu mengoptimalkan jaringan pemasaran antar wilayah maupun ekspor (*Ships follow the trade, Ships Promote the trade*).

Kapal Khusus angkutan ternak telah beroperasi sejak tahun 2015 dengan 1 armada kapal Camara Nusantara (CN) dan terus bertambah hingga tahun 2026 sudah tersedia 6 armada kapal yang melayani 6 Rute Trayek (RT). Daerah yang menjadi pangkalan trayek kapal khusus angkutan ternak adalah Provinsi NTT, NTB dan Gorontalo, sementara daerah penerima ternak diantara DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Sejak awal beroperasi tahun 2015 hingga tahun 2025, Kapal khusus angkutan ternak telah mengangkut ternak sebanyak 344.891 ekor dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen. Realisasi muatan per tahun dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Realisasi Muatan Kapal Ternak Tahun 2015-2025

Berdasarkan grafik realisasi muatan relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah muatan menurun 32,01% jika dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan karena adanya proses *Docking* armada kapal Camara Nusantara, setelah itu kembali mengalami peningkatan secara terus menerus hingga tahun 2021. Terjadi penurunan muatan hingga tahun 2023 dikarenakan merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga lalu lintas ternak dari produsen ke konsumen semakin terbatas untuk mengurangi penyebaran penyakit. Pemerintah Provinsi NTT juga menjadi lebih hati-hati dikarenakan NTT merupakan satu-satunya provinsi yang bebas dari penyakit PMK. Kenaikan terus menerus terjadi pada tahun 2024 hingga 2025 dikarenakan kasus PMK sudah mulai melandai dan lalu lintas ternak dari produsen ke konsumen sudah kembali normal.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Berkoordinasi dengan provinsi pemanfaat kapal ternak untuk mengoptimalkan penggunaan kapal khusus angkutan ternak di luar hari raya Idul Adha.
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pengendalian PMK terkait dengan pembukaan lalu lintas ternak dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan hewan.

b. Pendampingan Investasi Sapi Perah dan Sapi Pedaging

Pendampingan investasi sapi perah dan sapi pedaging ditargetkan dilakukan terhadap 274 pelaku usaha. Pendampingan yang dilakukan antara lain pendampingan pemanfaatan lahan, pendampingan perizinan, dan pendampingan pembiayaan.

1) Pendampingan pemanfaatan lahan

Pendampingan pemanfaatan lahan dilakukan kepada investor yang berkomitmen untuk berinvestasi sapi dengan pola integrasi. Lahan yang dapat digunakan sebagai lahan investasi usaha sapi lahan di bawah kewenangan Badan Bank Tanah, Kementerian Kehutanan, PT. Berdikari, dan Pemerintah Daerah. Pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi lahan calon lokasi investasi, serta melakukan koordinasi dan diskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait mekanisme pemanfaatan dan dukungan lahan investasi.

2) Pendampingan perizinan

Perizinan lingkungan dan kesesuaian tata ruang merupakan syarat perizinan dasar bagi pelaku usaha sebelum memulai kegiatan budidaya ternak. Proses yang kompleks, waktu yang panjang, serta keterbatasan pemahaman teknis sering kali menjadi hambatan utama bagi investor untuk merealisasikan rencana investasinya. Untuk itu, calon investor membutuhkan pendampingan perizinan agar prosesnya berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pendampingan perizinan yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi informasi perizinan, pendampingan perizinan lingkungan dan tata ruang.

3) Pendampingan akses pembiayaan

Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha dan investor baru di bidang peternakan adalah keterbatasan modal dan sulitnya memperoleh akses terhadap lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, dilakukan fasilitasi pembiayaan yang tidak hanya memberikan kemudahan akses kredit, tetapi juga pendampingan teknis dan kelembagaan agar investasi dapat berjalan berkelanjutan dan produktif. Pendampingan akses pembiayaan antara lain sosialisasi pembiayaan untuk peternakan sapi dari perbankan, koordinasi terkait pembiayaan alternatif dari lembaga pemerintah non perbankan, audiensi calon investor dengan pihak perbankan terkait kendala akses pembiayaan, pengajuan pembiayaan ternak sapi dengan skema khusus kepada Kemenko Perekonomian.

c. Pendampingan Hilirisasi Hasil peternakan

Pembinaan dan pendampingan pascapanen dan pengolahan susu di Kelompok Peternak/Koperasi Sapi Perah dan di Unit Pengolahan Hasil (UPH) Susu.

Kelompok peternak dan koperasi sapi perah sebagai pemasok utama bahan baku susu segar memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan susu segar yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan standar higiene sejak dari tingkat peternak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat variasi kualitas susu segar yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh penerapan manajemen pemerahan, penanganan pascapanen di tingkat peternak, serta sistem pengumpulan dan penyimpanan susu segar di kelompok peternak/koperasi.

Pembinaan dan pendampingan kelompok ternak/koperasi sapi perah diarahkan untuk meningkatkan penerapan tata cara penanganan pascapanen yang baik meliputi pemerahan susu, penanganan susu segar yang higienis, pengendalian rantai dingin, serta pengujian mutu susu secara rutin. Upaya ini bertujuan agar koperasi mampu menyediakan bahan baku susu segar yang bermutu dan konsisten bagi unit pengolahan susu, sehingga mendukung keberhasilan penerapan CPPOB, pemenuhan standar keamanan pangan, serta peningkatan daya saing produk olahan susu secara berkelanjutan.

Pembinaan dan pendampingan pada unit pengolahan susu dilakukan untuk mengatasi tantangan UPH susu khususnya skala mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) untuk pengajuan sertifikat NKV, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB), izin edar MD dan halal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha unit pengolahan hasil susu dalam penerapan CPPOB, rendahnya kesadaran akan pentingnya standar mutu dan keamanan pangan, keterbatasan sarana dan prasarana produksi yang memenuhi standar, serta belum optimalnya sistem dokumentasi dan pencatatan proses produksi.

Selain itu, pelaku usaha skala kecil umumnya belum memiliki pendampingan teknis yang berkelanjutan dalam melakukan perbaikan fasilitas, penerapan prosedur operasional standar, serta pemenuhan persyaratan administrasi perizinan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengajuan sertifikasi dan perizinan sering mengalami kendala dan memerlukan waktu yang panjang.

Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan ini, diharapkan unit pengolahan susu skala kecil mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan CPPOB secara konsisten, memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, serta mempercepat pemenuhan perizinan dan sertifikasi, sehingga produk susu yang dihasilkan aman, bermutu, dan berdaya saing di pasar.

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Kegiatan NSPK bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan NSPK termasuk kebijakan dibidang pascapanen dan pengolahan, mutu, investasi dan pengembangan usaha, dan pemasaran. Realisasi kegiatan pada tahun 2025 yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
 - Persyaratan perizinan ditetapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko usaha, dan besaran skala usaha yang

mencakup: 1) Rencana usaha (lokasi, jenis komoditas, dan galur); 2) Kesanggupan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) Jika galur yang akan dikembangkan baru perlu mendapatkan rekomendasi dari komisi bibit.

- Adapun alur perizinan berusaha disederhanakan melalui mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi secara elektronik, dimulai dari pendaftaran dan pengisian data usaha oleh pelaku usaha, penetapan tingkat risiko usaha secara otomatis oleh sistem, pemenuhan persyaratan dan komitmen sesuai klasifikasi risiko, proses verifikasi dan pengawasan oleh instansi berwenang, hingga penerbitan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengaturan tersebut, Permentan Nomor 34 Tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, sekaligus menjamin efektivitas pengawasan dan keberlanjutan usaha peternakan
- b. Petunjuk Teknis Pendampingan Penerapan dan Pengawasan Mutu telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 12358/KPTS/PK.030/F/11/2025.
- c. Petunjuk Teknis tentang Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10985/KPTS/PP.040/F/10/2025.
- d. Petunjuk Teknis Pengembangan Pasar Ternak telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 12945/KPTS/HK.160/F/12/2025.

D. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Anggaran Direktorat Hilirnak pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.500.000.000,-, realisasi anggaran mencapai Rp. 4.498.880.440,- (99,98%).–Realisasi per rincian output sebagaimana tabel 16.

Tabel 16. Target dan Realisasi Keuangan Per KRO Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		%
		Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	
EC	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI		4.500.000.000		4.498.880.440	99,98
5891	Hilirisasi Hasil Peternakan		4.500.000.000		4.498.880.440	99,98
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1.923.189.000		1.922.900.137	
001	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	278 Lembaga	1.923.189.000	278 Lembaga	1.922.900.137	99,98
AEA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria		300.000.000		299.835.726	
001	NSPK PPHNak	3 NSPK	300.000.000	4 NSPK	299.835.726	99,95
AFA	Koordinasi		2.276.811.000		2.276.144.577	
001	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi PPHNak	4 Kegiatan	2.276.811.000	4 Kegiatan	2.276.144.577	99,97

Sumber: OMSpan, diolah Direktorat Hilirnakan, 2025

Berdasarkan alokasi anggaran per jenis kewenangan, realisasi keuangan tertinggi adalah anggaran kantor pusat sebesar 99,98%, dan tugas pembantuan/dekon sebesar 98,77%. Secara rinci realisasi tersebut dapat dilihat dalam tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan Tahun 2025.

No	Kewenangan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Kantor Pusat	4.469.410.000	4.468.665.440	99,98
2	Tugas Pembantuan	30.590.000	30.215.000	98,77
	Jumlah	4.500.000.000	4.498.880.440	99,98

Sumber : OMSpan, diolah Direktorat Hilirnakan, 2025

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat Hilirnak tahun 2025 berpedoman pada hasil perhitungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Efisiensi Direktorat Hilirnak diukur dengan menghitung secara agregat variabel Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), baik Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) pada Rincian Output (RO) dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan Efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Ditjen PKH. Pengukuran Nilai Efisiensi Direktorat Hilirnak dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Kementerian Keuangan telah memfasilitasi sistem informasi Aplikasi Monev Kemenkeu sebagai sumber data Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK untuk menghitung Nilai Efisiensi Satuan Kerja. Berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu, nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK sebagaimana tersaji pada Lampiran 4, sehingga dapat diperoleh Nilai Efisiensi Direktorat Hilirnak T.A. 2025 adalah:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK}) \\ &= (40\% \times 83,33) + (60\% \times 0) \\ &= 33,33\%\end{aligned}$$

D. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pelaksanaan kinerja pengembangan hilirisasi hasil peternakan tahun 2025 sudah berjalan optimal, walaupun masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi/ditanggulangi.

1. Hambatan/Kendala

a. Pascapanen dan pengolahan hasil peternakan antara lain:

1) Kontinuitas pasokan bahan baku

Ketersediaan bahan baku hasil ternak yang belum stabil, baik dari sisi jumlah maupun mutu, menyebabkan kontinuitas produksi kurang terjamin.

2) Keterbatasan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil peternakan

Masih terbatasnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi, khususnya pada pelaku usaha skala mikro dan kecil menyebabkan menyebabkan rendahnya mutu dan keamanan produk hasil peternakan, meningkatnya risiko kontaminasi, terbatasnya kapasitas produksi, serta menurunnya daya saing produk di pasar.

3) Belum optimalnya penerapan standar mutu dan keamanan pangan

Pelaku usaha pascapanen dan pengolahan hasil peternakan belum sepenuhnya menerapkan cara penanganan hasil produksi yang baik (*good handling practices*) dan cara produksi pangan olahan yang baik (*good manufacturing practices*), sehingga berdampak pada belum terjaminnya mutu dan keamanan produk serta menurunkan daya saing produk di pasar.

4) Keterbatasan kapasitas SDM

Pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mengenai penanganan pascapanen, teknologi pengolahan, serta manajemen usaha masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap pelatihan teknis, pendampingan berkelanjutan, serta keterbatasan informasi mengenai inovasi teknologi dan standar pengolahan yang berlaku.

- 5) Akses pembiayaan dan investasi yang terbatas
Pelaku usaha mikro dan kecil masih mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan permodalan untuk pengadaan peralatan maupun biaya operasional.
 - 6) Akses pasar dan rantai distribusi yang belum optimal
Produk olahan hasil peternakan belum sepenuhnya terhubung dengan pasar yang lebih luas akibat keterbatasan jejaring pemasaran dan logistik rantai dingin.
- b. Mutu hasil peternakan antara lain:
- 1) Kurangnya data hasil uji mutu dari pelaku usaha atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan.
 - 2) Kurangnya koordinasi, pendampingan penerapan, dan pengawasan standar mutu hasil peternakan kepada pelaku usaha.
- c. Investasi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan:
- 1) Terbatasnya ketersediaan lahan yang *clean* dan *clear* untuk pengembangan usaha peternakan terutama sapi;
 - 2) Proses perizinan usaha yang panjang;
 - 3) Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan;
 - 4) Ketidaksiapan infrastruktur dasar di calon lokasi investasi;
 - 5) Keterbatasan pasokan sapi di negara asal sehingga menyebabkan harga sapi meningkat sehingga investor kesulitan memperoleh sapi dengan kualitas dan harga yang diharapkan.
 - 6) Skema KUR belum sesuai dengan karakteristik usaha pembibitan dan pembesaran ternak, terutama usaha ternak ruminansia besar yang membutuhkan skema kredit dengan suku bunga 3% dan *grace period* sampai dengan 3 tahun;
 - 7) Skema Kredit Usaha Alsintan (KUA) belum banyak diakses oleh peternak dan belum banyak disalurkan oleh bank penyalur karena persyaratan yang ketat bagi calon debitur;
 - 8) Pelaksanaan kemitraan peternakan masih belum sesuai dengan prinsip dan regulasi kemitraan sehingga cenderung merugikan peternak;

- 9) Pemerintah daerah belum berperan optimal terkait implementasi pengawasan dan pelaksanaan kemitraan;
 - 10) Pelaku usaha belum melaporkan dan menindaklanjuti perbaikan implementasi kemitraan secara optimal;
 - 11) Peran koperasi belum kuat mewadahi kelembagaan usaha.
- d. Pengembangan pemasaran antara lain:
- 1) Akses pasar yang terbatas karena tingginya ketergantungan pada pasar lokal atau pasar yang sudah ada;
 - 2) Mutu produk yang dipasarkan masih belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - 3) Biaya produksi yang tinggi menyebabkan harga jual produk yang tinggi terutama pada biaya transportasi dan distribusi;
 - 4) Rendahnya nilai tambah produk menyebabkan daya saing produk rendah;
 - 5) Daya saing dengan produk impor lebih konsisten dari segi harga dan kualitas menyebabkan preferensi konsumen lebih memilih produk impor.

2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya dan tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka pemecahan hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Pascapanen dan pengolahan hasil peternakan yaitu :
- 1) Penguatan kemitraan dengan pemasok bahan baku Membangun kemitraan antara unit pengolahan dengan peternak atau koperasi sebagai penyedia bahan baku agar pasokan terjamin dari sisi kuantitas dan kualitas.
 - 2) Mendorong perbaikan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil peternakan melalui fasilitasi akses pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta dukungan hibah dari pemerintah dan mitra pembangunan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar higiene dan sanitasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing produk hasil peternakan.
 - 3) Pembinaan dan pendampingan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil peternakan

Pembinaan dan pendampingan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil peternakan bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha agar menerapkan tata cara penanganan pascapanen dan pengolahan yang baik meliputi pemerasan susu, penanganan susu segar yang higienis, pengendalian rantai dingin, pengolahan susu dengan memperhatikan traceability serta pengujian bahan baku dan produk jadi secara berkala sehingga terpenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

4) Fasilitasi akses pembiayaan

Menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan, perbankan, program bantuan pemerintah dan kemitraan dengan pihak swasta untuk mendukung investasi peralatan dan pengembangan usaha.

5) Pengembangan jejaring pemasaran dan logistik

Mendorong integrasi rantai pasok dingin (cold chain) dan perluasan akses pasar, termasuk untuk mendukung suplai produk olahan dalam program-program strategis pangan.

b. Mutu hasil peternakan yaitu:

- 1) Pengumpulan data hasil uji mutu dari pelaku usaha atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan.
- 2) Koordinasi dan/atau pendampingan penerapan dan/atau pengawasan standar mutu di pelaku usaha.

c. Investasi, pengelolaan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan:

- 1) Koordinasi bersama Kementerian Kehutanan, Badan Bank Tanah, dan BUMN terkait penyediaan dan pemanfaatan lahan;
- 2) Koordinasi bersama Kementerian LH, ATR/BPN, Kemenvest/BKPM terkait pendampingan perizinan;
- 3) Koordinasi lebih lanjut bersama Kemenko Perekonomian terkait usulan skema pembiayaan usaha peternakan yang sesuai dengan karakteristik usaha ternak sapi dan ayam;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pembiayaan, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian selaku unit kerja Eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi pembiayaan usaha pertanian.

- 5) Melakukan koordinasi bersama bank himbara terkait skema pembiayaan khusus untuk subsektor peternakan.
 - 6) Sosialisasi pelaksanaan kemitraan kepada seluruh pelaku usaha;
 - 7) Mengoptimalkan peran dinas terkait dalam pengawasan kemitraan;
 - 8) Melakukan pengawasan lapangan sebagai upaya implementasi perbaikan kemitraan;
 - 9) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen pengelolaan koperasi.
- d. Pengembangan pemasaran:
- 1) Memfasilitasi promosi dagang, business matching, dan pameran produk peternakan guna mengurangi ketergantungan pada pasar lokal yang sudah ada.
 - 2) Melakukan peningkatan penerapan standar produksi dan pascapanen, seperti penerapan Good Farming Practices (GFP), Good Handling Practices (GHP), serta pemenuhan sertifikasi yang relevan (NKV, halal, SNI). Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pengawasan mutu secara berkelanjutan menjadi penting untuk menjamin konsistensi kualitas produk.
 - 3) Optimalisasi jalur distribusi, pemanfaatan sarana transportasi bersama, serta pengembangan *cold chain* dapat menekan biaya transportasi dan kehilangan mutu produk. Penggunaan pakan lokal, peningkatan manajemen usaha, serta penerapan teknologi tepat guna diharapkan mampu menurunkan biaya produksi dan menjaga harga jual tetap kompetitif.
 - 4) Melakukan peningkatan nilai tambah dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan produk olahan peternakan seperti produk beku, siap masak, atau siap saji yang memiliki daya simpan lebih lama dan nilai ekonomi lebih tinggi.
 - 5) Melakukan peningkatan efisiensi produksi dan konsistensi kualitas produk domestik agar mampu bersaing dari sisi harga dan mutu. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk lokal melalui kampanye bangga produk peternakan dalam negeri juga menjadi strategi penting.

BAB IV

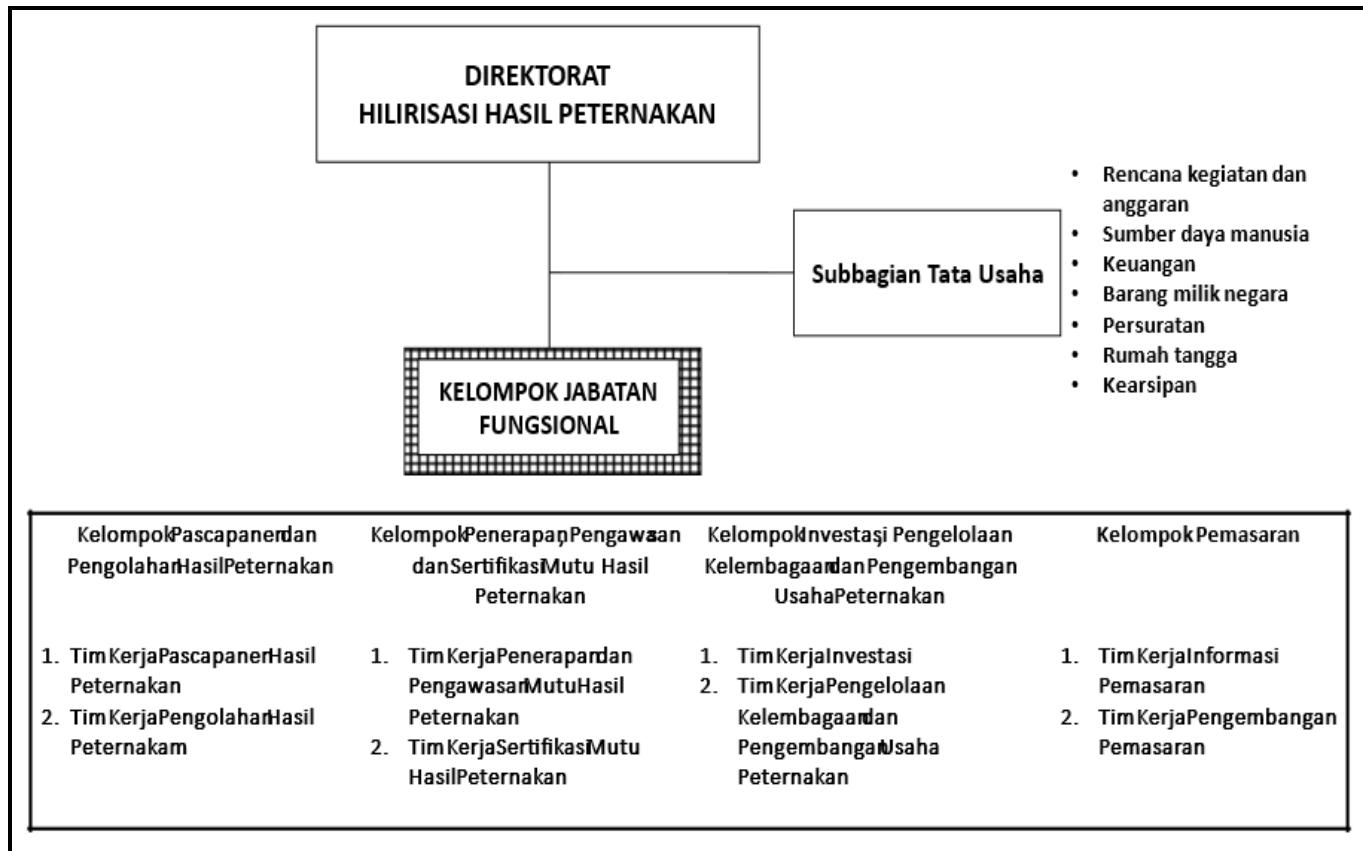
PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Hilirnak Tahun 2025 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen dan informasi bagi penilaian kinerja yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2025. Capaian kinerja sasaran kegiatan Direktorat Hilirnak pada tahun 2025 termasuk kriteria **sangat berhasil**. Jika dilihat dari indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja termasuk kriteria **sangat berhasil** karena capaiannya lebih besar dari 100%, dan 2 (satu) indikator kinerja termasuk kriteria **berhasil** karena capaiannya 100%. Indikator kinerja dimaksud dan capaiannya sebagai berikut: (1) Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan capaian 110,00%; (2) Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar dengan capaian 103,46%; (3) Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan dengan capaian 103,04%. Indikator yang termasuk dalam kriteria **berhasil** yaitu: (4) Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan; dan (5) Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan masing-masing dengan capaian 100%.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama penjabaran tugas dan fungsi baru untuk Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pengembangan hilirisasi hasil peternakan tahun 2025 tidak lepas dari dukungan seluruh kegiatan di lingkup Direktorat Hilirnak dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.

Lampiran 1

Struktur Organisasi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan



Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmun

Jabatan : Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

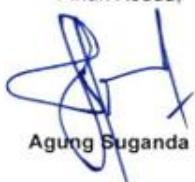
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

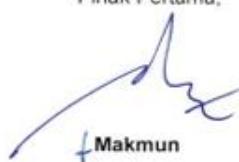
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Makmun

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR HILIRISASI HASIL PETERNAKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	100 %
2	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	80 %
3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	45 %
4	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	20 %
5	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	16,26 %

Kegiatan

Hilirisasi Hasil Peternakan

Anggaran

Rp. 4.500.000.000,-

Jakarta, Desember 2025

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan

Agung Suganda

Direktur Hilirisasi Hasil
Peternakan

Makmun



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmun

Jabatan : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Agung Suganda

Makmun

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hasil Peternakan	Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.290.007 US\$ 000
		Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	5,14 %
2.	Meningkatnya Nilai Tambang Komoditas Peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	95 %

Kegiatan

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Anggaran

Rp. 4.500.000.000,-

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan

Agung Suganda

Jakarta, Desember 2024

Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan



Agung Suganda



Maekmun



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjenak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenak.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmun

Jabatan : Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Agung Suganda

Jakarta, Februari 2025

Pihak Pertama,

Makmun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

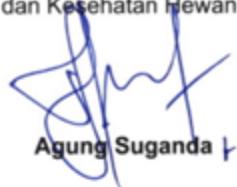
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR HILIRISASI HASIL PETERNAKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hasil Peternakan	Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.290.007 US\$ 000
		Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	5,14 %
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	95 %

Kegiatan	Anggaran
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Rp. 4.500.000.000,-

Jakarta, Februari 2025

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan



Agung Suganda

Direktur Hilirisasi Hasil
Peternakan



Makmun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581 - 83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482 Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjennak.deptan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmun

Jabatan : Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Agung Suganda

Pihak Pertama,

Makmun

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR HILIRISASI HASIL PETERNAKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hasil Peternakan	Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.300.000 US\$ 000
		Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	5,14 %
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Peternakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	100 %

Kegiatan
Hilirisasi Hasil Peternakan

Anggaran
Rp. 4.500.000.000,-

Jakarta, Oktober 2025

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan

Agung Suganda

Direktur Hilirisasi Hasil
Peternakan

Makmun

Lampiran 3

Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja/Uraian
SK 1.	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan
IKSK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Tingkat pemanfaatan peluang atau akses pasar oleh pelaku usaha peternakan (unggas) dari total akses atau peluang pasar yang tersedia dan telah berhasil dibuka.</p> <p>Total akses pasar yang didapat adalah jumlah kemitraan usaha peternak unggas (plasma) dengan perusahaan inti pada tahun berjalan.</p> <p>Akses pasar yang dimanfaatkan adalah termanfaatkannya peluang kemitraan yang digunakan secara aktif oleh inti plasma.</p>
	<p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kemitraan unggas Ditjen PKH 2. Laporan pelaku usaha
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <p>Berdasarkan trend realisasi kemitraan unggas yang dilaporkan pelaku usaha</p>
	<p>Baseline 2024: 100%</p> <p>Cara menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi data kemitraan unggas Ditjen PKH. 2. Identifikasi laporan kejadian kasus akses pasar kemitraan 3. Hitung dengan rumus: $\frac{\text{Total Kemitraan} - \text{Jumlah Laporan Kasus Akses Pasar Kemitraan}}{\text{Total Kemitraan}} \times 100\%$

	<p>Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU:Tahunan</p>
SK 2.	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor
IKS K 2.1.	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Indikator ini mengukur sejauh mana kesiapan produk peternakan nasional untuk memasuki pasar ekspor dibandingkan dengan total potensi ekspor yang tersedia. "Produk siap ekspor" merujuk pada komoditas peternakan yang telah memenuhi standar mutu, keamanan pangan, persyaratan teknis serta ketentuan negara tujuan ekspor, sedangkan "total potensi ekspor" mencakup keseluruhan volume atau jenis produk peternakan yang berpotensi diekspor berdasarkan produksi dalam negeri dan kapasitas industri dikurangi dengan konsumsi/kebutuhan dalam negeri.</p> <p>Produk komoditas peternakan siap ekspor yang diukur adalah produk unggas dan sarang burung walet</p>
	<p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data proyeksi produksi Ditjen PKH, data proyeksi konsumsi dalam negeri. 2. BPS 3. Statistik Ditjen PKH
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi total produksi unggas dan sarang burung walet tahun dasar (baseline). 2. Identifikasi total konsumsi unggas dan sarang burung walet dalam negeri tahun dasar (baseline) 3. Hitung dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah produksi} - \text{jumlah konsumsi}}{\text{Jumlah produksi}} \times 100\%$
	Baseline 2024: 40%
	Cara Menghitung:

	$\frac{\text{Jumlah produksi} - \text{jumlah konsumsi}}{\text{Jumlah produksi}} \times 100\%$ <p>1. Jumlah produksi adalah total produksi unggas dan jumlah produksi SBW pada tahun berjalan</p> <p>2. Jumlah produksi SBW berdasarkan asumsi rata-rata volume ekspor (ton)</p> <p>3. Jumlah konsumsi unggas dalam negeri berdasarkan konsumsi perkapita/tahun atau kebutuhan dalam negeri/tahun</p> <p>4. Jumlah konsumsi SBW dalam negeri berdasarkan asumsi maksimal 5% dari total produksi/ekspor SBW</p> <p>Satuan Pengukuran: persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
SK 3	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing
IKSK 3.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah terhadap total komoditas peternakan unggulan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Rasio dalam persentase dari jumlah komoditas peternakan yang bernilai tambah dibagi total komoditas peternakan unggulan.</p>
	<p>Sumber data:</p> <p>BPS, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan</p>
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah komoditas bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas yang diprioritaskan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah dan berdaya saing melalui pascapanen dan/atau pengolahan pada tahun berjalan. 2. Total komoditas peternakan unggulan adalah susu, daging, telur, sarang burung walet dan madu.
	<p>Baseline 2024: 0</p> <p>Baseline 2024 adalah 0 yang artinya Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan</p>

	merupakan IKSK baru.
	<p>Cara Menghitung:</p> $\frac{\text{Jumlah komoditas yang bernilai tambah dan berdaya saing}}{\text{Jumlah komoditas peternakan unggulan}} \times 100\%$ <p>1. Jumlah komoditas yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah jumlah komoditas unggulan prioritas yang mendapat pendampingan dan pembinaan agar bernilai tambah melalui pascapanen dan/atau pengolahan</p> <p>2. Total komoditas peternakan unggulan adalah 5 komoditas, yaitu daging ayam, daging sapi, susu, telur dan sarang burung walet.</p>
SK 4	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
IKSK 4.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	<p>Deskripsi:</p> <p>Peningkatan investasi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan rataan peningkatan nilai investasi baru maupun perluasan yang berasal dari PMA dan PMDN dibidang peternakan dan kesehatan hewan.</p>
	<p>Sumber data:</p> <p>Laporan BKPM/Kementerian Investasi dan Hilirisasi</p>
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <p>Nilai rataan persentase peningkatan investasi PMA dan PMDN dibidang peternakan dan kesehatan hewan ditahun berjalan</p>
	Baseline 2024: 15,76 %
	<p>Cara Menghitung:</p> <p>Peningkatan Investasi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan <i>year on year</i></p> $= \frac{\text{Jumlah PMA dan PMDN tahun berjalan} - \text{jumlah PMA dan PMDN tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah PMA dan PMDN tahun sebelumnya}} \times 100\%$

	<p>Satuan Pengukuran : Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi : Maximize Periode Data IKU : Tahunan</p>
SK 5.	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu
IKSK 1.	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan yang siap edar
	<p>Deskripsi:</p> <p>Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan yang siap edar merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pemenuhan persyaratan mutu produk peternakan siap edar berdasarkan parameter mutu non keamanan pangan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan standar mutu yang berlaku.</p> <p>Ruang lingkup komoditas mencakup komoditas prioritas untuk mendukung program pemerintah, khususnya MBG, dengan indicator/parameter yang digunakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku, antara lain : SNI 9226:2023 Karkas dan Daging Sapi/Kerbau, SNI 3924:2023 Karkas dan Daging Ayam Ras, SNI 3926:2023 Telur Ayam Konsumsi, dan/atau SNI 3141:2024 Susu Mentah.</p> <p>Penilaian dilakukan terhadap parameter mutu non keamanan pangan yang tercantum dalam SNI, baik parameter kualitatif maupun kuantitatif. Tingkat pemenuhan setiap parameter ditentukan berdasarkan kesesuaian hasil uji mutu produk dan atau hasil pengawasan pre market dan atau post market terhadap ketentuan standar. Persentase pemenuhan dihitung dari perbandingan jumlah sampel yang memenuhi persyaratan terhadap total sampel yang diuji, dan nilai persentase akhir dilaporkan sebagai nilai rata rata dari seluruh parameter mutu non keamanan pangan yang dinilai</p>
	<p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Indonesia (SNI), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) SNI 9226:2023 Karkas dan Daging Sapi/Kerbau, b) SNI 3924:2023 Karkas dan Daging Ayam Ras, c) SNI 3926:2023 Telur Ayam Konsumsi, dan d) SNI 3141:2024 Susu Mentah - Sapi. 2. Hasil uji mutu produk peternakan binaan Ditjen PKH (UPH, Poktan/Gapoktan, Kelompok Peternak, UMKM, Koperasi, dll). 3. Hasil pengawasan pre-market dan atau post-market terhadap mutu produk

	peternakan yang termasuk dalam ruang lingkup pengukuran.
	<p>Cara Penetapan Target:</p> <p>Penetapan target produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu berdasarkan pada hasil pengawasan/pengujian produk peternakan yang dihasilkan oleh unit usaha/UPH yang siap edar. Pengambilan sampel dilaksanakan secara purposif /random sampling.</p>
	Baseline 2024: belum ada karena merupakan indikator baru
	<p>Cara Menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan parameter dan sampel yang dinilai Menetapkan seluruh parameter mutu non keamanan pangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang tercantum dalam SNI yang digunakan untuk masing masing komoditas, serta menetapkan jumlah sampel produk peternakan siap edar yang dilakukan pengujian mutu dan atau pengawasan pre market dan atau post market. Menilai pemenuhan parameter mutu Melakukan penilaian pemenuhan setiap parameter mutu non keamanan pangan terhadap seluruh sampel berdasarkan kesesuaian dengan persyaratan standar (memenuhi atau tidak memenuhi). Menghitung persentase pemenuhan mutu produk peternakan siap edar Persentase pemenuhan mutu dihitung secara agregat menggunakan rumus berikut: $\text{Persentase} = \frac{\text{Total komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu}}{\text{Total jumlah pengawasan/pengujian mutu hasil peternakan}} \times 100 \%$ <p>Satuan Pengukuran: % Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>

Lampiran 4

Pengukuran Efisiensi dan Nilai Efisiensi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
Tahun 2025

No.	Satker	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Efisiensi SBK (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11=6-10	12=10/6	13	14	
1	238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5891.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (NSPK)	SBKK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	100.000.000	3	3	299.835.726	99.945.242	54.758	0	0	0,00
2	238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	305.000.000	275	275	1.892.310.137	6.881.127	298.118.873	98	0	
3	239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	305.000.000	1	1	10.150.000	10.150.000	294.850.000	97	0	
4	249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	305.000.000	1	1	10.200.000	10.200.000	294.800.000	97	0	
5	319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	305.000.000	1	1	10.240.000	10.240.000	294.760.000	97	0	

No.	Unit	Satker	Program	R0	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK	
												12
▼	2	▼	3	▼	4	▼	5	▼	6	▼	7	▼
1	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5891.AEA.001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (kegiatan)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	2.276.144.577	4	569.036.144	Tidak	
2	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5891.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (NSPK)	SBKK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	100.000.000	299.835.726	3	99.945.242	Ya	
3	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	238776 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	305.000.000	1.892.310.137	275	6.881.127	Ya	
4	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	239129 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	305.000.000	10.150.000	1	10.150.000	Ya	
5	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	249161 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	305.000.000	10.200.000	1	10.200.000	Ya	
6	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	319091 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5891.QDB.001 Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	SBKK	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (Lembaga)	305.000.000	10.240.000	1	10.240.000	Ya	

Lampiran 5

**Unit Usaha Pengolahan Susu yang Sudah Bersertifikat
Nomor Kontrol Veteriner (NKV)**

NO	UNIT USAHA	NOMOR NKV	TANGGAL TERBIT	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA LOKASI
1	PT. FAIRPACK INDONESIA	UPS-321619-0010	24 Desember 2025	JAWA BARAT KAB. BEKASI
2	KOPERASI KONSUMEN KUJANG SAUYUNAN BERDIKARI	UPS-187201-0002	23 Desember 2025	LAMPUNG KOTA METRO
3	CV. PRIMA MITRA SEJATI	UPS-330808-0001	16 Desember 2025	JAWA TENGAH KAB. MAGELANG
4	PT. CAMILLA ARSANA RASA	UPS-331009-0001	09 Desember 2025	JAWA TENGAH KAB. KLATEN
5	CV. PERANAKAN ETAWA ABADI	UPS-340415-0003	30 November 2025	DI YOGYAKARTA KAB. SLEMAN
6	CV. IRFAI FOOD SEJAHTERA	UPS-350609-0003	17 November 2025	JAWA TIMUR KAB. KEDIRI
7	PT. GLICO MANUFACTURING INDONESIA	UPS-321527-0001	14 November 2025	JAWA BARAT KAB. KARAWANG
8	EVI ZAINAL ABIDIN	UPS-351421-0001	13 November 2025	JAWA TIMUR KAB. PASURUAN
9	PT. KIAN MULIA MANUNGGAL	UPS-357824-0007	09 November 2025	JAWA TIMUR KOTA SURABAYA
10	SUMBER NUTRAFOOD INDONESIA	UPS-320112-0001	05 November 2025	JAWA BARAT KAB. BOGOR
11	CV. PRIMA ABADI GROUP	UPS-357902-0003	05 November 2025	JAWA TIMUR KOTA BATU
12	KOPERASI KONSUMEN KUJANG SAUYUNAN BERDIKARI	UPS-320105-0004	03 November 2025	JAWA BARAT KAB. BOGOR
13	PT. AICE ICE CREAM JATIM INDUSTRY	UPS-351605-0002	31 Oktober 2025	JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO
14	PT. SUMBER HIJAU FARM	UPS-321016-0001	27 Oktober 2025	JAWA BARAT KAB. MAJALENGKA
15	PT. SEHAT ALAM SEGAR	UPS-352510-0003	15 Oktober 2025	JAWA TIMUR KAB. GRESIK
16	PT. SELARAS HUSADA	UPS-351518-0010	13 Oktober 2025	JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO
17	SUSU KAMBING BUBUK PERDANA MANDIRI SEJAHTERA	UPS-320137-0002	09 Oktober 2025	JAWA BARAT KAB. BOGOR
18	BASIVO	UPS-180701-0001	08 Oktober 2025	LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR
19	THE MAGNUM ICE CREAM INDONESIA	UPS-321609-0005	25 September 2025	JAWA BARAT KAB. BEKASI
20	SAHABAT TERNAK FARM	UPS-340415-0002	12 September 2025	DI YOGYAKARTA KAB. SLEMAN
21	PT. META NUSA DHARMA	UPS-330219-0004	08 September 2025	JAWA TENGAH KAB. BANYUMAS
22	PT. GLOBAL DAIRY ALAMI	UPS-321327-0003	25 Agustus 2025	JAWA BARAT KAB. SUBANG
23	CV. CITA NASIONAL	UPS-332201-0004	08 Agustus 2025	JAWA TENGAH KAB. SEMARANG
24	KARYAWAN ABDI ALAM	UPS-180107-0004	07 Agustus 2025	LAMPUNG KAB. LAMPUNG SELATAN
25	PT. SUPERINDO UTAMA JAYA	UPS-187202-0002	28 Juli 2025	LAMPUNG KOTA METRO

NO	UNIT USAHA	NOMOR NKV	TANGGAL TERBIT	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA LOKASI
26	CV. ALM DAIRY	UPS-510305-0002	23 Juli 2025	BALI KAB. BADUNG
27	CV. GANESHA SORA	UPS-321701-0001	08 Juli 2025	JAWA BARAT KAB. BANDUNG BARAT
28	PT. FONUSA AGUNG MULIA	UPS-360415-0004	25 Juni 2025	BANTEN KAB. SERANG
29	CV. OSLE INDONESIA	UPS-357826-0006	17 Juni 2025	JAWA TIMUR KOTA SURABAYA
30	PT. ABC PRESIDENT INDONESIA	UPS-321505-0001	03 Juni 2025	JAWA BARAT KAB. KARAWANG
31	CV. LINSYAM JAYA FOOD	UPS-332101-0001	14 Mei 2025	JAWA TENGAH KAB. DEMAK
32	PT. INDUSTRI SUSU ALAM MURNI	UPS-327329-0002	08 Mei 2025	JAWA BARAT KOTA BANDUNG
33	PT. KALBE MILKO INDONESIA	UPS-320127-0003	08 Mei 2025	JAWA BARAT KAB. BOGOR
34	PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY	UPS-357824-0006	05 Mei 2025	JAWA TIMUR KOTA SURABAYA
35	PT. GERBANG MAS BERSAMA	UPS-321125-0001	16 April 2025	JAWA BARAT KAB. SUMEDANG
36	PT. SELARAS HUSADA	UPS-331310-0001	09 April 2025	JAWA TENGAH KAB. KARANGANYAR
37	PT. WIJAYA FOOD INDONESIA	UPS-330216-0001	17 Maret 2025	JAWA TENGAH KAB. BANYUMAS
38	RAHAYU SRI ASTUTIK	UPS-181001-0002	10 Maret 2025	LAMPUNG KAB. PRINGSEWU

Lampiran 6

Pelaku Usaha dan Produk Olahannya Yang Sudah Mendapat Izin Edar (MD)

NO	PELAKU USAHA PENGOLAHAN	NAMA PRODUK	NO REGISTRASI MD/ IPCPPOB	TANGGAL TERBIT
1	ABC Kogen Dairy	Susu Pasteurisasi Rasa Cokelat	MD 242811010500430	03-Sep-25
2	ALM Dairy	Susu Pasteurisasi (Pasteurized Milk)	MD 242211001400083	19-Nov-25
3	Batavia Indo Global	Susu Lemak Penuh Rekombinasi Rasa Rose	MD 253111006100142	12-Nov-25
4	BBPTU-HPT Batu Raden	Susu Full Cream Plain	MD 200111005104	16-Jul-25
5	Cita Nasional	Susu Pasteurisasi Rasa Tawar	MD 221111001200345	12-Nov-25
6	Koperasi Agro Niaga Jabung	Susu Pasteurisasi Rasa Stroberi	MD 200813032289	16-Mei-25
7	Koperasi Karyawan Abdi Alam	Susu Pasteurisasi	MD 220811000200284	24-Nov-25
8	Koperasi Mitrayasa Dairy Natural	Susu Pasteurisasi	IP CPPOP PW-S.04.09.14B.15B2.10.25-5011.PU (IP CPPOB)	28-Nov-25
9	Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara	Susu Pasteurisasi Rasa Coklat	MD 222811000401434	09-Sep-25
	Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara	Susu Pasteurisasi Rasa Plain	MD 222811000501434	09-Sep-25
10	KPBS Pangalengan	Susu Pasteurisasi Full Cream Plain Kemasan: Botol Plastik PET	MD 222811000101306	08-Nov-25
11	KUD Batu	Susu Pasteurisasi Rasa Vanilla	MD 223711000600578	30-Jan-25
12	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Biskuit Marie	MD 242811004500710	13-Nov-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Cokelat	MD 242811003600710	13-Nov-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Stroberi	MD 242811003200710	13-Nov-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Cokelat Hazelnut	MD 242811003000710	12-Nov-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Cokelat Almond	MD 242811003100710	12-Nov-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Cokelat Malt	MD 242811004700710	12-Nov-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Cokelat Tiramisu	MD 242811004800710	12-Nov-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Stroberi	MD 242811003200710	04-Sep-25
	PT. Cisarua Mountain Dairy	Susu UHT Rasa Cokelat	MD 242811013800710	09-Sep-25
13	PT. Cita Nasional	Susu Pasteurisasi Rasa Tawar	MD 221111001000345	09-Sep-25
14	PT. Diamond Cold Storage	Susu UHT Lemak Penuh Rekombinasi	MD 242811025900439	27-Aug-25
15	PT. Frisian Flag Indonesia	Susu Kental Manis Lemak Nabati Gula Aren	MD 242811007700677	7-Nov-25

NO	PELAKU USAHA PENGOLAHAN	NAMA PRODUK	NO REGISTRASI MD/ IPCPPOB	TANGGAL TERBIT
16	PT. Garudafood Putra Putri Jaya	Susu UHT Rasa Full Cream	MD 242811002600325	31-Jul-25
17	PT. Global Dairy Alami	Susu Lemak Penuh Rekombinasi	MD 242811001400064	12-Nov-25
	PT. Global Dairy Alami	Susu UHT Cokelat	MD 242811004400064	10-Nov-25
	PT. Global Dairy Alami	Susu Pasteurisasi Lemak Penuh (Full Cream)	MD 242811002200064	05-Jun-25
18	PT. Great Giant Pineapple	Susu Pasteurisasi	MD 220811004500109	25-Aug-25
	PT. Great Giant Pineapple	Susu Pasteurisasi Rasa Cokelat Belgia	MD 220811004600109	01-Sep-25
19	PT. Greenfields Indonesia	Susu Rasa Cokelat Malt	MD 243711004400020	14-Nov-25
	PT. Greenfields Indonesia	Susu Rasa Cokelat Malt	MD 243711007700020	14-Nov-25
	PT. Greenfields Indonesia	Susu Pasteurisasi	MD 243711003400020	14-Nov-25
	PT. Greenfields Indonesia	Susu UHT Rasa Cokelat	MD 243711008900020	3-Nov-25
20	PT. Greenfields Indonesia	Susu UHT Rasa Cokelat	MD 400813260621	14-Jul-25
	PT. Greenfields Indonesia	Susu UHT Full Cream	MD 400213330621	14-Jul-25
21	PT. Heavenly Nutrition Indonesia	Susu UHT Rasa Kopi / UHT Milk Coffee Flavor	MD 242811005300016	21-Nov-25
22	PT. Indolakto	Susu UHT Rasa Matcha	MD 243711005300356	21-Nov-25
	PT. Indolakto	Susu UHT Full Cream Rekombinasi	MD 243711001500356	14-Nov-25
	PT. Indolakto	Susu Minyak Nabati Evaporasi	MD 242811004700463	13-Nov-25
	PT. Indolakto	Susu UHT	MD 242811005200463	3-Nov-25
	PT. Indolakto	Susu UHT Rasa Cokelat	MD 400810253157	21-Nov-25
	PT. Indolakto	Susu UHT Full Cream Rekombinasi	MD 243711001500356	29-Aug-25
	PT. Indolakto	Susu Pasteurisasi Cokelat	MD 240911001800327	04-Sep-25
23	PT. Nestle Indonesia	Susu Lemak Penuh	MD 253711005900051	21-Nov-25
	PT. Nestle Indonesia	Susu Lemak Penuh	MD 253711005900051	24-Jul-25
24	PT. Sarihusada Generasi Mahardhika	Susu UHT Rasa Cokelat	MD 400812086019	14-Jul-25
25	PT. Ultrajaya Milk	Susu UHT	MD 242811003700030	11-Nov-25
	PT. Ultrajaya Milk	Susu UHT	MD 242811003600030	6-Nov-25
	PT. Ultrajaya Milk	Susu UHT Full Cream	MD 400210067129	10-Sep-25
26	Tirta Fresindo Jaya	Susu Steril	MD 252811000100497	25-Nov-25

Lampiran 7

Pembinaan dan Koordinasi Kemitraan dengan Pelaku Usaha

No.	Pelaku Usaha	Komoditas
1	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Ayam Ras Pedaging
2	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Ayam Ras Pedaging
3	PT. Berdikari	Ayam Ras Pedaging
4	PT. CJ PIA	Ayam Ras Pedaging
5	PT. Sreeya Sewu Indonesia	Ayam Ras Pedaging
6	PT. Bibit Indonesia (Malindo Group)	Ayam Ras Pedaging
7	PT. Sido Sari Multifarm	Ayam Ras Pedaging
8	PT. Hybro Indonesia	Ayam Ras Pedaging
9	PT. Super Unggas Jaya	Ayam Ras Pedaging
10	PT. Janu Putra Sejahtera	Ayam Ras Pedaging
11	PT. Taat Indah Bersinar	Ayam Ras Pedaging
12	PT. Karya Indah Pertiwi	Ayam Ras Pedaging
13	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Ayam Ras Pedaging
14	PT. Satwa Borneo Jaya (SBJ)	Ayam Ras Pedaging
15	PT. Cibadak Indah Sari Farm	Ayam Ras Pedaging
16	PT. Expravet Nasuba	Ayam Ras Pedaging
17	PT. Reza Perkasa	Ayam Ras Pedaging
18	PT. Widodo Makmur	Ayam Ras Pedaging
19	CV. Missouri	Ayam Ras Pedaging
20	PT. Cipta Terang Unggul	Ayam Ras Pedaging
21	PT. Mitra Berlian Unggas	Ayam Ras Pedaging
22	PT. Dinamika Mega Citra	Ayam Ras Pedaging
23	PT. Intan Jaya Abadi	Ayam Ras Pedaging
24	PT. Karya Indah Pertama	Ayam Ras Pedaging
25	PT. Aretha Nusantara Farm	Ayam Ras Pedaging
26	PT. Mustika	Ayam Ras Pedaging
27	PT. SIM	Ayam Ras Pedaging
28	Aseng FARM Sukabumi	Ayam Ras Pedaging
29	PT. Ganesa/Mahesa	Ayam Ras Pedaging
30	Bandung Jaya	Ayam Ras Pedaging
31	CV. ASPI	Ayam Ras Pedaging
32	PT. Telkomsel/Indiko	Ayam Ras Pedaging
33	PT. BAS	Ayam Ras Pedaging
34	PT. BROMAT	Ayam Ras Pedaging
35	PT. Bintang Tama Sentosa (BTS)	Ayam Ras Pedaging
36	PT. Surya Bintang Sejati	Ayam Ras Pedaging
37	Berlian Indomitra Sentosa (BISA)	Ayam Ras Pedaging

38	PT. Rukun Mitra Bersama	Ayam Ras Pedaging
39	PT. Trisula Bintang Utama	Ayam Ras Pedaging
40	PT.Tumbuh Optimal Prima	Ayam Ras Pedaging
41	PT. Nestle Indonesia	Sapi Perah
42	PT. Frisian Flag Indonesia	Sapi Perah
43	PT. Freshland Inovasi Sejahtera	Sapi Perah
44	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (So Good Food)	Sapi Perah
45	PT. Diamond	Sapi Perah
46	CV. Cita nasional	Sapi Perah
47	PT. Yummy Food Utama	Sapi Perah
48	PT. Sarihusada Generasi Mahardhika	Sapi Perah
49	PT. Mirota KSM	Sapi Perah
50	PT. Indolakto	Sapi Perah
51	PT. Garuda Food	Sapi Perah
52	PT. Sanghiang Perkasa	Sapi Perah
53	PT. ABC Kogen Dairy	Sapi Perah
54	PT. Greenfields Indonesia	Sapi Perah
55	PT. Global Dairy Alami	Sapi Perah
56	PT. Cisarua Mountain Dairy	Sapi Perah
57	PT. Ultrajaya Tbk	Sapi Perah
58	PT. Industri Susu Alam Murni	Sapi Perah
59	KPS Bogor	Sapi Perah
60	KUD Giri Tani	Sapi Perah
61	KPS Cianjur Utara	Sapi Perah
62	KUD Gemah Ripah	Sapi Perah
63	KUD Puspamekar	Sapi Perah
64	KUD Sarwamukti	Sapi Perah
65	KPSBU Lembang	Sapi Perah
66	KUD Sinarjaya	Sapi Perah
67	Kop Mitra Jaya Mandiri	Sapi Perah
68	KPKM Pasirjambu	Sapi Perah
69	KPBS Pangalengan	Sapi Perah
70	KPSP Saluyu Kuningan	Sapi Perah
71	KSU Karya Nugraha	Sapi Perah
72	KSU Tandangsari	Sapi Perah
73	KPGS Cikajang	Sapi Perah
74	KUD Bayongbong	Sapi Perah
75	UPP Kaliurang	Sapi Perah
76	PESAT (Purwokerto)	Sapi Perah
77	KUD Mojosongo	Sapi Perah
78	Koperasi Peternakan Sarono Makmur	Sapi Perah
79	KUD Banyumanik	Sapi Perah

80	KUD Mekar	Sapi Perah
81	KUD Jatinom	Sapi Perah
82	KUD Musuk	Sapi Perah
83	KUD Kota Boyolali	Sapi Perah
84	KUD Getasan	Sapi Perah
85	KUD Cepogo	Sapi Perah
86	KUD Mardi Mulya	Sapi Perah
87	KUD Sumber Karya	Sapi Perah
88	KUD Wahyu Agung	Sapi Perah
89	KUD Banyu Aji	Sapi Perah
90	Kop SAE	Sapi Perah
91	KUD Sumber Makmur	Sapi Perah
92	KUD Batu	Sapi Perah
93	KUD Karangploso	Sapi Perah
94	KUD Gondanglegi	Sapi Perah
95	KUD Satya Dharma	Sapi Perah
96	KAN Jabung Syariah	Sapi Perah
97	KPSP Sidodadi	Sapi Perah
98	KUD Tani Luhur	Sapi Perah
99	KPSP Setia Kawan	Sapi Perah
100	KUTT Suka Makmur	Sapi Perah
101	KUD Dadi Jaya	Sapi Perah
102	KUD Sembada	Sapi Perah
103	KUD Agropuro	Sapi Perah
104	KUD Tani Makmur	Sapi Perah
105	Kop Dana Mulya	Sapi Perah
106	KPUB Sapi Jaya	Sapi Perah
107	KUD Kertajaya	Sapi Perah
108	KUD Tani Jaya	Sapi Perah
109	KUD Karya Bhakti	Sapi Perah
110	KUD Sidoluhur	Sapi Perah
111	KUD Suka Mulya	Sapi Perah
112	KUD Sri Among Tani	Sapi Perah
113	KUD Tulus Bhakti	Sapi Perah
114	KUD Subur	Sapi Perah
115	KUD Tani Wilis	Sapi Perah
116	Koptan Jasa Tirta	Sapi Perah
117	KUD Semen	Sapi Perah
118	KSU Jaya Abadi	Sapi Perah
119	KUD Anjasmoro	Sapi Perah

120	UD Bancar	Sapi Perah
121	Koperasi Merah Putih	Sapi Perah
122	Nawasena Satya Perkasa	Sapi Perah

Lampiran 8

**Surat Tugas Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025**



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 11800KS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815586 - 83, 7847319 Faksimile (021) 7815581 - 83, 7847318 E-mail : djj@npkh.pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT TUGAS
NOMOR: B-127/OT.050/F6/05/2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui pencapaian keberhasilan kegiatan hilirisasi hasil peternakan, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

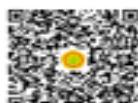
Dasar : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 79/Kpts/KP.230/M/02/2025 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 3312/Kpts/Kp.230/F/03/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Kerja Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memberi Tugas :

Kepada : Nama-nama sebagaimana susunan terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Tugas ini.

Untuk : 1. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai tugas dan fungsi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan;
2. Apabila dipandang perlu untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, Ketua Tim dapat melibatkan unsur di luar anggota tim.

Jakarta, 23 Mei 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan,



n, M.Sc.
NIP 197403082002121006

Tembusan :

Pejabat yang bersangkutan.

Dokumen ini telah diendatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSe), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Surat Tugas Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan
NOMOR : B-127/OT.050/F6/05/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025

**TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DIREKTORAT HILIRISASI HASIL PETERNAKAN**

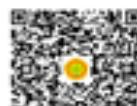
A. Pengarah

Ketua : Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan
Anggota :
1. Ketua Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan
2. Ketua Kelompok Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan
3. Ketua Kelompok Pemasaran
4. Ketua Kelompok Investasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan

B. Pelaksana

Ketua : Ketua Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan
Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha
Anggota :
1. Ahmad Wiro'i, S.Kom., M.M
2. Asmardi Nata Afri, S.Pt
3. Anton Supriyadi, S.Pt., M.AP
4. R. Jatu Winantoro, S.Pt., M.Si
5. Hermawan Sutanto, S.TP
6. Rini Prastyanty, S.TP
7. Abdul Kadir Latulanit, S.Pt
8. Lisa Dwi Lestari, S.Pt
9. Diajeng Mutiara Zaskia, S.Kom

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan,



c M.Sc.
NIP 197403082002121006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Badan Siber dan Sandi Negara